

**KETEPATAN PENGAKUAN PENDAPATAN  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEWAJARAN  
LAPORAN KEUANGAN PADA PERUM PEGADAIAN  
DI SURABAYA**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



.KK.  
A. 2020/95  
Ros.  
L

ADLN  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

**DIAJUKAN OLEH**  
***IIK IDA ROSIYATI***  
**No. Pokok : 048913230**

**KEPADA**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**1995**

SKRIPSI  
KETEPATAN PENGAKUAN PENDAPATAN  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN  
PADA PERUM PEGADAIAN DI SURABAYA

DIAJUKAN OLEH

IIK IDA ROSIYATI

No. Pokok : 048913230

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING, \*3

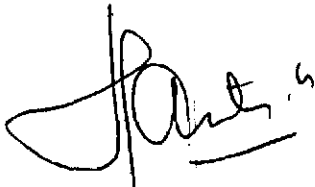


WIDI HIDAYAT, SE, MSI, AK

TANGGAL

15-06-15

KETUA JURUSAN AKUNTANSI,



DRA. Ec. HARIATI H. GAFFAR, AK.

TANGGAL

15-6-15

Surabaya, 27-05-195

TELAH DISETUJUI DAN SIAP DIUJI OLEH

DOSEN PEMBIMBING



(WIDI HIDAYAT, SE, Msi, Ak)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Penulis menyadari, selesainya skripsi ini berkat bantuan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini, penulis dengan sepenuh hati menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang tercinta Ibu dan Alm. Ayah, serta anggota keluarga lainnya, yang telah memberikan dorongan kepada penulis baik moril maupun materiil hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Widi Hidayat, SE, MSi, Ak yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing, memberi pengarahan serta nasihat-nasihat yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pimpinan dan seluruh staf serta bapak/ibu dosen yang telah memberikan kesempatan dan ilmu pengetahuan pada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

4. Pimpinan dan seluruh Staf Kantor Daerah XI Perum Pegadaian, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta memberikan keterangan dan data yang sangat berguna sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Rekan-rekan angkatan 1989, yang teristimewa : Ira, Asti, Rachma, Susan, Farida, Marina, Pandji, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dorongan dan bantuannya hingga terselesainya skripsi ini.

Dan penulis juga menyadari, walaupun telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada, namun sebagai manusia biasa tentu saja penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Karena itu penulis menghargai segala saran dan kritik atas skripsi ini. Harapan penulis, kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan masukan yang positif bagi seluruh pembaca.

Surabaya, Juni 1995.

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Permasalahan .....	6
3. Tujuan Penelitian .....	9
4. Manfaat Penulisan .....	10
5. Sistematika Skripsi .....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	13
1. Landasan Teori .....	13
1.1. Pandangan Umum .....	13
1.2. Pengertian Akuntansi .....	15
1.3. Konsep Dasar .....	18
1.4. Prinsip-prinsip Akuntansi .....	21
1.5. Laporan Keuangan .....	27
1.5.1. Pengertian Laporan Keuangan .....	27

	Halaman
1.5.2. Tujuan Laporan Keuangan .	32
1.5.3. Arti Pentingnya Laporan Keuangan .....	36
1.5.4. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan .....	36
1.6. Pendapatan .....	40
1.6.1. Pengertian Pendapatan ..	41
1.6.2. Komponen Pendapatan ....	42
1.6.3. Pengukuran Pendapatan ..	44
1.6.4. Saat Pengakuan Pendapatan	45
<del>1.6.5.</del> Penyajian Dalam Laporan Keuangan .....	52
2. Pedoman Pembahasan .....	55
3. Metodologi Penelitian .....	56
3.1. Definisi Operasional .....	56
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	58
3.3. Prosedur Pengumpulan Data .....	58
3.4. Teknik Analisis .....	59
<b>BAB III : ANALISIS .....</b>	<b>60</b>
1. Gambaran Umum Perusahaan Umum Pegadaian .....	60
1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian .....	60
1.2. Struktur Organisasi Kantor Daerah Perum Pegadaian .....	64



	Halaman
1.3. Prosedur Akuntansi Kredit .....	71
1.4. Barang Jaminan .....	87
1.5. Laporan Keuangan - Kantor Daerah Perum Pegadaian .....	88
2. Pembahasan .....	91
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....	103
1. Kesimpulan .....	103
2. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
i. Persentase Sewa Modal .....	74



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Hierarki Elemen Struktur Teori Akuntansi .....	21
2. Struktur Organisasi Kantor Daerah Perum Pegadaian .....	65
3. Prosedur Pemberian Pinjaman .....	78
4. Prosedur Pelunasan Pinjaman Yang Diberikan ...	82
5. Prosedur Pelaksanaan Lelang .....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Neraca Kanda XI Perum Pegadaian per 30 Nopember 1994.
- Lampiran 2. Laporan Laba Rugi Kanda XI Perum Pegadaian per 30 Nopember 1994.
- Lampiran 3. Neraca Hasil Olahan Penulis per 30 Nopember 1994.
- Lampiran 4. Laporan Laba Rugi Hasil Olahan Penulis per 30 Nopember 1994.



BAB I  
PENDAHULUAN

ILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, seperti halnya di negara-negara yang sedang berkembang, sering penciptaan investasi sektor swasta terutama yang berkala kecil mengalami diskontinuitas. Pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak sempat diakumulasikan menjadi investasi baru. Kebutuhan pembiayaan yang cepat pada periode produksi lanjutan tidak memungkinkan untuk mengakumulasikan pendapatan tersebut menjadi investasi. Sektor ekonomi dengan skala kecil lebih mementingkan kontinuitas usaha dari pada memperluas usaha dengan penciptaan investasi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan peranan pemerintah dalam memberikan bantuan kelembagaan yang menjamin tersalurkannya pinjaman lunak. Misalnya Bank Unit Desa, Koperasi dan lembaga sejenisnya. Pinjaman lunak berjangka pendek tersebut disamping akan membantu kelancaran usaha juga dapat membantu pengembangan investasi baru. Contoh yang tampak di Indonesia misalnya Kredit Usaha Tani, Kredit Investasi Kecil, dan Kredit Umum Pedesaan yang menggunakan pola perbankan, sedangkan kredit yang menggunakan pola gadai melalui Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian mempunyai usaha pokok menyalurkan kredit/uang pinjaman, baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif, dengan jaminan barang bergerak melalui hukum gadai. Artinya, barang yang digunakan sebagai jaminan pinjaman langsung akan dilelang oleh pihak Perum Pegadaian jika dalam batas waktu tertentu peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya. Pola gadai dan perbankan berbeda dalam hal pemberian kredit. Kredit atas dasar hukum gadai disalurkan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat. Kredit yang disalurkan oleh Perum Pegadaian untuk membina perekonomian rakyat kecil, masyarakat golongan ekonomi lemah yang umumnya terdiri dari nelayan, petani, pengrajin dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pola gadai melalui Perum Pegadaian masih tetap diminati oleh masyarakat, terutama masyarakat golongan bawah. Oleh karena itu perkembangan Perum Pegadaian dalam jangka panjang masih diperlukan oleh masyarakat.

Perum Pegadaian merupakan kelanjutan dari Perjan Pegadaian yang dialihkan bentuknya menjadi Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1990. Perubahan status ini tidak mengubah misi Pegadaian. Menilik Peraturan Pemerintah tersebut, tujuan Pegadaian adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan program ekonomi dan pembangunan melalui

pemberian kredit secara hukum gadai. Dari sini sifat Pegadaian adalah membantu pemerintah dan melayani masyarakat, serta dibenarkan pula memupuk keuntungan.

Untuk dapat memenuhi tugas yang dibebankan kepada Perum Pegadaian sebagai badan usaha milik negara (BUMN) diperlukan kemampuan manajemen yang memadai. Kemampuan tersebut hanya diperoleh bila ditunjang dengan informasi yang lengkap, up to date, tepat waktu, reliable dan dapat dimengerti serta dianalisa. Salah satu dari sekian banyak informasi adalah laporan keuangan.

Sebagai suatu entity, Perum Pegadaian akan menyusun laporan keuangan pada setiap akhir periode. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha. Sesuai dengan AICPA mengenai Objective of Financial Statement :

"An objective of financial statement is to provide factual and interpretative informations about transactions and other events which is useful for predicting, comparing, and evaluating enterprise's earning power."<sup>1</sup>

Laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi keuangan yang disajikan akan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

---

<sup>1</sup>AICPA, Objective of Financial Statement, dikutip dari Eldon S. Hendriksen, Accounting Theory, halaman 157



Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan antara lain : pemilik, manajemen, kreditur dan investor, calon kreditur dan investor pegawai, Kantor Inspektur Pajak dan pemerintah. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, laporan keuangan harus menyediakan informasi yang dapat diandalkan atau tidak menyesatkan. Hal ini penting bagi :

- a. perencanaan efektif, pengendalian dan pengambilan keputusan oleh manajemen ;
- b. pertanggung jawaban organisasi kepada para investor, kreditur, badan-badan pemerintah, dan lain-lain.

Dengan demikian, laporan keuangan harus menyajikan secara wajar atau layak posisi keuangan suatu perusahaan.

Laporan keuangan dapat dikatakan wajar apabila :

1. tidak ada pos-pos yang dinyatakan terlalu besar atau terlalu kecil dalam jumlah yang material ;
2. informasi yang dianggap perlu telah cukup diungkapkan.

Agar pos-pos tersebut tidak dinyatakan terlalu besar atau terlalu kecil diperlukan ketepatan metode akuntansi dan ketepatan penyajian laporan keuangan.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1, laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), dan catatan



atas laporan keuangan, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.<sup>2</sup>

Para pengguna laporan keuangan, pada umumnya menitik beratkan perhatiannya pada laba atau kemampulabaan suatu perusahaan. Hal ini disinyalir oleh FASB Statement of Financial Accounting Concept No. 1 mengenai An Objective of Financial Statement by Business Enterprise, dinyatakan bahwa : "Sasaran utama laporan keuangan adalah informasi tentang prestasi perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponennya."<sup>3</sup>

Dalam suatu laporan laba rugi, akan terlihat dua komponen penting yang menunjukkan total pendapatan bersih suatu perusahaan untuk periode tertentu. Dua komponen penting dalam laporan laba rugi adalah :

1. pendapatan yang diperoleh perusahaan pada suatu periode ;
2. biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan.

---

<sup>2</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1994, halaman 1.1

<sup>3</sup> Hendriksen, Eldon S., Teori Akuntansi, Edisi Keempat, Terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, halaman 128

Pendapatan adalah faktor terpenting untuk mendapatkan laba, oleh karenanya penentuan pendapatan harus dilakukan dengan tepat agar benar-benar mencerminkan hasil usaha dalam suatu periode.

Mengingat pentingnya perlakuan akuntansi yang tepat atas pendapatan terhadap kewajaran laporan keuangan, perlu dilakukan penelitian atas pengakuan pendapatan pada Perum Pegadaian sebagai tangan kanan pemerintah dalam membantu rakyat kecil, tetapi yang dimungkinkan juga untuk memperoleh keuntungan-keuntungan.

## 2. Permasalahan

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Perum Pegadaian, penulis menemukan beberapa perbedaan antara teori dan praktek dalam penentuan waktu yang tepat untuk mengadakan pengakuan terhadap suatu pendapatan. Hal ini akan memberikan pengaruh yang cukup material terhadap jumlah pendapatan yang sebenarnya menjadi hak suatu periode tertentu.

Permasalahan penulis batasi pada penerimaan kas yang berasal dari sewa modal dalam penyelesaian dan hasil penjualan barang jaminan yang diterima pada periode berikutnya.

Persetujuan kredit yang diberikan atas dasar hukum gadai menimbulkan kewajiban bagi nasabah untuk membayar

sewa modal, disamping kewajiban untuk menebus barang jaminan atau mengembalikan hutang pokoknya.

Tetapi karena berbagai faktor dalam diri debitur, sesuatu yang memaksa sehingga tidak bisa membayar sewa modal per 15 hari. Sewa modal atas kredit yang diberikan memang diperhitungkan secara per 15 hari, karena kecilnya jumlah kredit yang diberikan. Atas dasar tunggakan sewa modal, Perum Pegadaian menjurnal :

Pendapatan y.m.h. diterima xx

Pendapatan sewa modal xx

Akun "Pendapatan sewa modal" dimasukkan sebagai unsur pendapatan dalam laporan laba rugi. Bila dalam 120 hari atau 4 bulan piutang ini tidak terbayar, maka Perum Pegadaian akan menjurnal :

Pendapatan sewa modal xx

Sewa modal dalam penyelesaian xx

dan dikeluarkan dari neraca. Hal ini juga dikeluarkan dari pendapatan tahun berjalan. Selanjutnya pendapatan y.m.h. diterima bulan ke 5 langsung tidak dicatat dalam neraca.

"Sewa modal dalam penyelesaian" merupakan akun administratif, yaitu suatu akun yang tidak termasuk dalam neraca maupun laporan laba rugi. Penyajiannya biasanya dicantumkan dibawah neraca.

Dalam penyusunan laporan keuangan oleh Perum Pegadaian perhitungan umur sewa modal diperhitungkan

menurut golongan barang, yaitu per 120 hari atau 4 bulan. Sehingga semua pendapatan yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan, dihitung sejak tanggal persetujuan kredit, dianggap sebagai "sewa modal dalam penyelesaian".

Penerimaan kas dari sewa modal dalam penyelesaian dianggap sebagai pendapatan pada periode dimana Perum Pegadaian menerima pembayaran sewa modal yang tertunggak dari nasabah. Bila penerimaan kas dari pendapatan sewa modal dalam penyelesaian diterima pada periode berikutnya, maka pendapatan pada periode sekarang, dimana pendapatan sewa modal seharusnya diakui, menjadi understated dan pendapatan pada penerimaan kas menjadi overstated.

Jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat menebus barang jaminan atau ingkar, maka Perum Pegadaian akan memperoleh barang jaminan nasabah; yang kemudian akan diurus penjualannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara. Hasil penjualannya akan digunakan untuk menutup pinjaman yang diberikan, sewa modal, bea lelang dan sisa hasil penjualannya akan dikembalikan kepada nasabah. Atas dasar kejadian ini Perum Pegadaian akan melakukan dua pencatatan, yaitu menutup piutang nasabah dan membebankan pada rugi laba dengan jurnal :

a. Penyisihan piutang	xx	
Pinjaman yang diberikan		xx
b. Penyisihan pendapatan y.m.h. diterima	xx	
Pendapatan y.m.h. diterima		xx

dan menjurnal saat penerimaan kas dari hasil penjualan barang jaminan dengan jurnal :

Kas	xx	
Pendapatan lain-lain		xx

Dengan demikian pendapatan dari hasil penjualan barang jaminan baru diakui pada saat penerimaan kas, bukan pada saat perpindahan hak milik barang jaminan dari nasabah kepada Perum Pegadaian saat debitur ingkar atau tidak menebus barangnya.

Bila hasil penjualan barang jaminan baru diterima secara kas pada periode berikutnya, maka pendapatan periode sekarang, dimana Perum Pegadaian mendapatkan hak untuk menjual barang jaminan, menjadi understated dan pendapatan pada periode penerimaan kas menjadi overstated.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : apakah Perum Pegadaian sudah menerapkan pengakuan pendapatan dengan tepat dalam usaha untuk menyusun laporan keuangan yang wajar ?

### 3. Tujuan Penulisan

Skripsi dengan latar belakang masalah tersebut diatas mempunyai tujuan :

1. Untuk memahami secara teoritis dan praktis mengenai pengakuan pendapatan dan manfaat yang diharapkan.
2. Untuk memberi uraian dan penilaian tentang situasi dari keadaan Perum Pegadaian, serta kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan periodik yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima, terutama pendapatan.

#### 4. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai informasi bagi Perum Pegadaian dalam usaha menyusun laporan keuangan periodik yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima.
2. Sebagai bagaian informasi ilmiah bagi peneliti lanjutan tentang pendapatan pada Perum Pegadaian.

#### 5. Sistematika Skripsi

Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri dari 4 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika skripsi.



**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori, yang meliputi : pandangan umum, pengertian akuntansi, konsep dasar, prinsip-prinsip akuntansi, laporan keuangan, dan pendapatan. Pada bab ini juga dibahas mengenai pedoman pembahasan dan metodologi penelitian.

Metodologi penelitian akan mencakup definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

**BAB III : ANALISIS**

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum hasil penelitian dan pembahasan. Pada gambaran umum, penulis akan menguraikan perkembangan Pegadaian secara umum. Sedangkan pada pembahasan akan ditujukan pada analisis terhadap data yang terkumpul. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis diskriptif, yang menggambarkan secara garis besar tata pekerjaan Perum Pegadaian, dan analisis komparatif yang membandingkan teori dengan penerapan pengakuan pendapatan pada Perum Pegadaian.

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup dalam skripsi ini yang memuat kesimpulan yang diperoleh dari



semua uraian pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran dari penulis berkenaan dengan penulisan skripsi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. LANDASAN TEORI

##### 1.1. Pandangan Umum

Pemakai laporan keuangan pada umumnya menghendaki adanya penentuan laba secara periodik. Hal ini didasarkan pada konsep kontinuitas usaha (going concern). Bahwa berdirinya suatu unit usaha bukan untuk periode tertentu saja tetapi untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pelaporan laba atau rugi suatu unit usaha selain berguna bagi pihak intern dibutuhkan juga oleh pihak ekstern, maka dalam prakteknya laporan laba rugi secara berkala harus dilaporkan. Untuk kepentingan pelaporan secara berkala, tentu tidak bisa dihindari adanya unsur-unsur yang kurang tepat. Meskipun demikian tidak boleh diartikan bahwa penentuan pendapatan periodik tidak perlu setepat mungkin. Sebab penentuan pendapatan yang kurang tepat dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi dari laporan keuangan perusahaan.

Tujuan utama pelaporan income, seperti yang dikatakan oleh Theodurus M. Tuanakotta dalam bukunya Teori Akuntansi :

"Tujuan utama pelaporan income adalah untuk memberikan informasi kepada mereka yang menaruh minat terhadap laporan keuangan ... sedang tujuan-tujuan yang lebih khusus meliputi pemakaian income sebagai

pengukuran efisiensi manajemen, pemakaian angka-angka historial untuk membantu meramalkan masa depan perusahaan atau deviden di waktu yang akan datang dan pemakaian income sebagai ukuran keberhasilan dan pedoman mengenai keputusan-keputusan di masa yang akan datang."<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, menunjukkan pelaporan income secara periodik tidak hanya berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan, tetapi juga berguna bagi pihak ekstern untuk menilai keberhasilan manajemen. Hal inilah yang menyebabkan banyak pihak memberikan perhatian utama terhadap laporan laba rugi (income statement).

Dalam proses pengukuran income terdapat dua hal yang penting, yaitu penentuan yang tepat atas pendapatan yang harus dilakukan terlebih dahulu baru kemudian ditentukan biaya-biaya sebagai pengurang pendapatan.

Penentuan pendapatan menyangkut masalah penentuan saat kapan pendapatan harus diakui dan berapa besarnya pendapatan yang harus dicatat. Pada umumnya para penulis tentang teori akuntansi mengatakan bahwa suatu pendapatan direalisasikan pada saat barang atau jasa telah diserahkan pada langganan. Namun demikian W.A. Paton dan A.C. Littleton menyebutkan : "... there are special conditions under which a variation from the sale standard

---

<sup>4</sup>Theodurus M. Tuanakotta, Teori Akuntansi, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 1983, hal. 110-111

is often considered acceptable because the revenue can be measured with some assurance on production basis".<sup>5</sup>

Pendapatan adalah faktor terpenting untuk mendapatkan laba, oleh karenanya penentuan pendapatan harus dilakukan dengan tepat agar benar-benar mencerminkan hasil usaha dalam suatu periode. Ketidaktepatan dalam penentuan pendapatan diantaranya akan menyebabkan ketidaktepatan penyajian income di dalam laporan keuangan.

## 1.2. Pengertian Akuntansi

Didalam memberikan arti tentang akuntansi beberapa definisi memberikan tekanan yang berbeda-beda. Menjelaskan tentang lingkup akuntansi, S. Hadibroto menegaskan bahwa : "Akuntansi bukan pembukuan. Pembukuan hanya suatu teknik akuntansi untuk mencatat data keuangan menurut suatu metode tertentu".<sup>6</sup>

Sedangkan akuntansi diartikan lebih luas lagi, yaitu :

"... meliputi pengetahuan tentang tata buku, tetapi ia juga meliputi pembuatan berbagai teknik pencatatan (sistem-sistem akuntansi), interpretasi laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, cara-cara pelaporan fakta-fakta usaha, dan berbagai teknik untuk mengawasi

<sup>5</sup> Paton, W.A. and Littleton, A.C.; An Introduction to Accounting Standards, American Accounting Association, halaman 50.

<sup>6</sup> S. Hadibroto, Studi Perbandingan Antara Akuntansi Amerika, Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Di Indonesia, PT Ikhtiar Baru van-Hoeve, Jakarta, 1982, halaman 3.

seluruh jalannya sesuatu organisasi dari segi uang maupun kuantitas".<sup>7</sup>

Mengenai ciri-ciri akuntansi, AICPA mendefinisikan sebagai berikut :

"Accounting is the art recording, classifying, and summarizing, in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of financial character and interpreting the result there off"<sup>8</sup>

Sedangkan didalam memberikan tekanan pada akuntansi sebagai suatu konsep informasi, AICPA didalam Accounting Principles Standard Board Statement No. 4 mendefinisikan akuntansi :

"Accounting is a service activity, its function is to provide quantitative information primarily financial in nature, about economic entities that is intendend to be useful in making economic dicsion in making reason ed choices among alternatif course of action".<sup>9</sup>

Dengan berdasarkan beberapa definisi tersebut maka pokok pengertian akuntansi adalah :

1. Akuntansi mencakup aktifitas jasa.
2. Akuntansi merupakan suatu seni untuk mencatat, mengklafisikasikan serta mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang bersifat keuangan.

<sup>7</sup> S. Hadibroto, loc. cit.

<sup>8</sup> AICPA, Accounting "Terminology Bulletin No. 1: Review and Resume, dikutip dari Ahmed Belkaoui, Accounting Theory, Harcourt Brace Jovanovich Inc., New York, halaman 2.

<sup>9</sup> AICPA, APB Statement No. 4: Basic Concept and Accounting Underlying Financial Statement of Business Enterprises, New York, 1970, par. 40.

3. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif mengenai suatu unit ekonomi.
4. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu
5. Mempunyai lingkup yang sangat luas meliputi pengetahuan tentang tata buku, pembuatan sistem-sistem akuntansi, menyajikan dan menginterpretasikan laporan keuangan, serta mencakup teknik-teknik untuk mengadakan pengawasan jalannya sesuatu organisasi baik dari segi nilai uang maupun kuantitasnya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi merupakan sekumpulan teknik untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Walaupun akuntansi merupakan seperangkat teknik, yang bermanfaat untuk bidang tertentu, namun dipraktekkan suatu kerangka teoritis yang harus dipatuhi. Kerangka ini tersusun dari prinsip dan praktek yang telah memperoleh dukungan profesi karena logika dan kegunaannya yang telah dapat diduga. Hal ini dikenal sebagai "Prinsip Akuntansi Yang Diterima Umum" (generally acceptance), yang mana merupakan pedoman dalam memilih teknik akuntansi dan penyajian laporan keuangan menurut suatu cara yang dianggap telah menjadi praktek akuntansi yang baik. Tetapi dalam perkembangannya prinsip-prinsip ini selalu berubah serta tunduk pada pengujian yang terus menerus dan suatu analisa yang kritis.



Perubahan-perubahan tersebut terjadi terutama karena tuntutan untuk menyelesaikan masalah akuntansi yang sedang timbul, serta dalam usaha untuk merumuskan suatu kerangka teoritis disiplin itu sendiri. Jadi terdapat hubungan antara teori dan praktek akuntansi yang mana berusaha untuk menyangkal dan membenarkan praktek-praktek yang ada.

### 1.3. Konsep Dasar

Teori akuntansi dimulai dengan menerima beberapa aksioma yang tidak perlu dibuktikan lebih dulu, disebut postulate atau konsep dasar (basic concept), yang sampai sekarang ini belum ada suatu kesatuan pendapat antara para ilmuwan. Hal ini dikarenakan penggunaan pendekatan yang berbeda dalam pembentukan teori akuntansi, serta perbedaan cara memandang "pemakai" data akuntansi itu berperan.

Eldon S. Hendriksen mendefinisikan teori akuntansi sebagai berikut :

"... as logical reasoning in the form of a set of based principle that (1) provide a general frame of reference by which accounting practice can be evaluated and (2) guide the development of new practices and procedure".<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hendriksen, Eldon S., Accounting Theory, Fourth Edition, Richard D. Irwin, Illinois, 1982, halaman 1.



Definisi memberikan suatu pengertian bahwa teori akuntansi merupakan seperangkat prinsip yang luas dan rasional yang memberikan suatu kerangka referensi umum untuk menilai praktek-praktek akuntansi yang baru. Sedangkan reference (acuan) berupa konsep-konsep dan prinsip-prinsip.

Prinsip-prinsip akuntansi yang oleh W.A. Paton dan A.C. Littleton disebut standard, dalam aplikasinya haruslah relevan dengan konsep-konsep dasar. Selanjutnya kedua ilmuan ini menunjukkan hubungan prinsip dan konsep dasar dengan pernyataan sebagai berikut :

"The approach to standard should be by way the basic concept or assumption underlying accounting, so that the standard formulated may be well grounded to be relevan, a standard need to be clearly related to the assential propuse af accounting; to be well grounded a standard need to be recognized as resting upon know accepted".<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya, prinsip akuntansi berlandaskan pada teori akuntansi. Sehubungan dengan hal itu, Ahmed Belkaoui merumuskan suatu struktur teori akuntansi. Teori akuntansi dimulai dari tujuan laporan keuangan (objectives of financial statement), yang mana dari tujuan tersebut akan melahirkan suatu postulate-postulate dan konsep teoritis akuntansi. Dari keduanya

---

<sup>11</sup>Paton, W.A and Littleton, A.C., An Introduction to Corporate Accounting Standard Monograph No. 3, American Accounting Association, Evanston Illinois, 1990, halaman 7.

akan lahir prinsip-prinsip akuntansi, dari prinsip-prinsip ini akan menimbulkan suatu perlakuan atau teknik akuntansi. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk hierarki elemen struktur teori akuntansi, seperti yang terlihat dalam gambar dibawah.

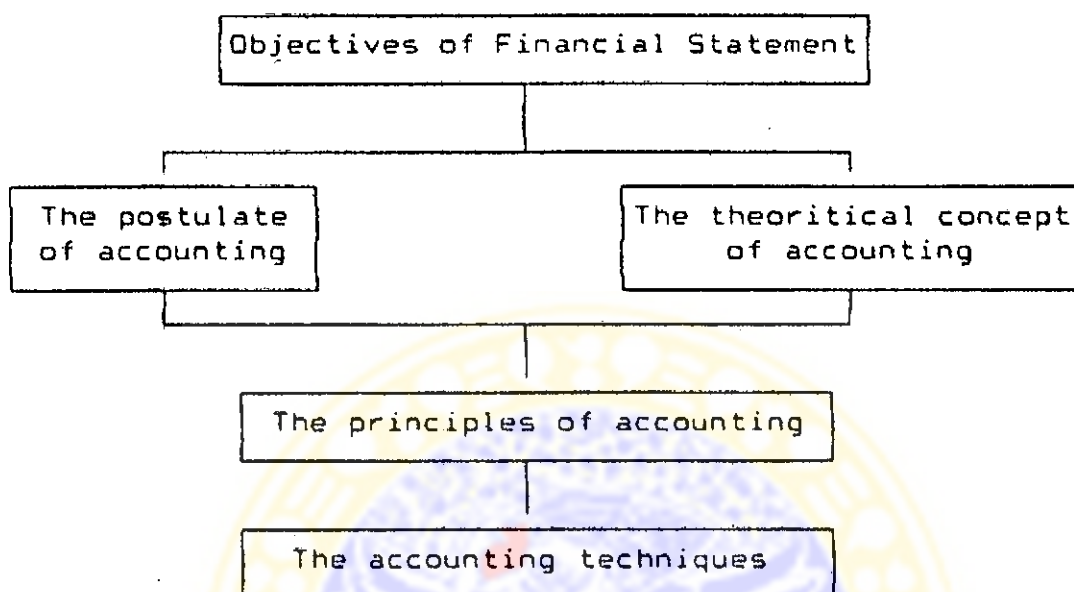
Postulate dipandang dari segi politik, sosiologi dan lingkungan. Selanjutnya menurut Ahmed Belkaoui ada 4 (empat) postulate dalam teori akuntansi, yaitu :

- a. The going concern postulate
- b. The unit measurement postulate
- c. The accounting period postulate
- d. The entity postulate

Sedangkan konsep teoritis dari akuntansi ada 3, yaitu :

- a. The proprietary theory
- b. The entity theory
- c. The fund theory

GAMBAR 1.

HIERARKI ELEMEN STRUKTUR TEORI AKUNTANSI

Sumber : Ahmad Belkaoui, Accounting Theory, Hancourt Brace Javanovich Inc., New York, 1981, hal. 102.

#### 1.4. Prinsip-prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi yang lazim adalah kebiasaan, aturan dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktek akuntansi yang diterima pada saat tertentu. Prinsip akuntansi tersebut bermanfaat untuk :

1. Memberi pedoman umum dalam pencatatan, penggolongan dan perlakuan terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan.
2. Agar laporan keuangan dapat diperbandingkan dan tidak menyesatkan.

Di Indonesia, prinsip akuntansi yang lazim diterima lebih luas dibandingkan dengan Standar Akuntansi

Keuangan (SAK). SAK hanyalah merupakan salah satu elemen prinsip akuntansi yang lazim Indonesia.

"Prinsip akuntansi yang lazim Indonesia meliputi standard akuntansi yang dilakukan oleh IAI (misal: SAK) pernyataan, pendapat atau interpretasi yang bersifat menambah, menjelaskan, mengganti ataupun memperluas arti PAI tersebut, dan berbagai praktek akuntansi yang belum diatur oleh SAK, namun berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang dilakukan dan kebiasaan yang sudah lazim berlaku di Indonesia".<sup>12</sup>

Sedangkan AICPA didalam Accounting Principles Standard Board Statement No. 4 menjelaskan sebagai berikut : "... generally accepted accounting principles, which determine the information that is included, how it is organized, measured, combined, and adjusted, and finally how it is presented in the financial."<sup>13</sup>

Prinsip akuntansi yang lazim bersifat konvensional, yaitu menjadi lazim karena persetujuan. Prinsip tersebut dikembangkan atas dasar pengalaman, pertimbangan dan kebiasaan. Suatu prinsip menjadi prinsip akuntansi yang lazim diterima melalui persetujuan (umumnya merupakan persetujuan secara diam-diam) dan tidak diperoleh secara formal dari seperangkat dalil.

---

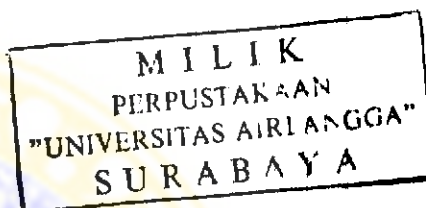
<sup>12</sup> Mulyadi, Pemeriksaan Akuntan, Edisi ketiga, Bagian Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta, 1990, halaman 16-17.

<sup>13</sup> AICPA, op.cit., par. 16.

Prinsip tersebut akan terus digunakan sampai dengan disetujuinya suatu prinsip yang baru yang dianggap lebih baik.

Beberapa prinsip akuntansi meliputi :

1. The cost principle
2. The matching principle
3. The consistency principle
4. The conservatism principle
5. The revenue principle
6. The objectivity principle
7. The materiality principle
8. The uniformity and comparability principle
9. The full disclosure principle



Penulis membatasi pada pembahasan beberapa prinsip akuntansi yang mendasari perlakuan atas pendapatan dan biaya. Prinsip-prinsip akuntansi tersebut adalah :

1. The cost principle
2. The matching principle
3. The conservatism principle
4. The revenue principle

ad.1. The cost Principle

Secara luas cost dapat didefinisikan sebagai berikut :

"Cost is amount, measured in money, of cash expenses or other property tranfered, capital stock issued in

consideration of goods or services or to be received".<sup>14</sup>  
Berdasarkan definisi diatas, cost merupakan suatu jumlah yang diukur dengan uang, untuk uang kas yang dibelanjakan barang-barang yang dipertukarkan atau modal saham yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa.

Dengan istilah lain, W.A. Paton dan A.C. Littleton menyebutkan cost sebagai : "... cost is substantially the equivalent of price aggregate (unit price time quantity) or bargained price".<sup>15</sup>  
Price aggregate adalah suatu bukti yang paling awal dari suatu transaksi yang jumlahnya ditentukan secara objective dengan adanya aksi serempak dari dua pihak yang independen berdasarkan kepentingan yang berbeda. Karena cost sebagai price aggregate dipandang sebagai fakta obyektif, maka pemakaiannya dalam akuntansi dapat dibenarkan.

Salah satu perlakuan atas cost adalah mempertemukannya dengan revenue (pendapatan) periode sekarang atau pendapatan periode yang akan datang. Dalam akuntansi dikenal suatu proses matching, yaitu mempertemukan beban dengan pendapatan periode sekarang.

---

<sup>14</sup> AICPA, op. cit., hal. 110.

<sup>15</sup> Paton, W.A. and Littleton, A.C., op. cit., halaman 125.



## ad.2. The Matching Principle

The matching principle menyatakan bahwa biaya-biaya harus diakui pada periode yang sama sebagai satu kesatuan dengan pendapatan. Pendapatan harus diakui pada saat tertentu menurut the revenue principle dan kemudian biaya yang bersangkutan diakui.

Pada dasarnya, proses matching adalah mempertemukan antara usaha-usaha untuk memperoleh pendapatan pada waktu periode tertentu dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut. Usaha-usaha digambarkan dengan harga pertukaran dari barang atau jasa yang diterima, sedangkan pendapatan digambarkan dengan harga pertukaran dari barang atau jasa yang diberikan.

Matching of cost revenues merupakan kombinasi atau pengakuan secara simultan dari pendapatan dan biaya yang diakibatkan secara langsung dan tergabung dari transaksi yang sama atau dari kejadian-kejadian lainnya.

W.A. Paton dan A.C. Littleton berpendapat :

"Accounting doesnot match disbursenent and receipt, but effort and accomplishments, service aquired and service rendered, aquisition price aggregate and disposition price aggregate. All these are comprehended within the terms "cost and revenue" and "accrual accounting".<sup>16</sup>

Hubungan antara biaya dan pendapatan tergantung pada salah satu dari kriteria mana yang dapat diterapkan :

---

<sup>16</sup>Paton, W.A. and Littleton, A.C., op. cit., halaman 166.



1. Pertemuan langsung antara pendapatan dan biaya, misal: harga pokok penjualan dengan pendapatan penjualan pada transaksi yang sama.
2. Pertemuan langsung antara biaya dengan periode yang bersangkutan, misal : gaji presiden dan direktur.
3. Alokasi biaya selama periode yang bersangkutan, misal: pemnyusutan, atau
4. Biaya dan cost yang lain pada periode yang bersangkutan kecuali kalau biaya tersebut masih mempunyai manfaat dimasa yang akan datang, misal: pengeluaran advertising.

#### ad.3. The Conservatism Principle

Conservatism timbul akibat adanya ketidakpastian. Prinsip ini pada umumnya digunakan dalam pengertian bahwa akuntansi harus melaporkan yang terendah diantara berbagai nilai asset dan revenue.

Namun akuntan harus melaporkan yang tertinggi diantara nilai yang ada untuk mengakui biaya-biaya sedini mungkin dan mengaku pendapatan selambat mungkin. Sikap pesimis dalam pelaporan informasi akan dipandang lebih baik dari pada sikap optimis.

Dengan prinsip konservatif dianggap bahwa overstatement dalam pendapatan dan penilaian harta mempunyai dampak yang lebih baik jika dibandingkan dengan understatement dalam pendapatan dan penilaian

harta. Dengan demikian, prinsip ini menghendaki agar praktek akuntansi telah memperhitungkan harga persediaan, kenaikan harga tersebut jangan diakui sebagai laba sehingga persediaan benar-benar telah terjual; namun apabila terjadi penurunan harga persediaan kerugian penurunan harga sudah dapat diakui walaupun persediaan belum terjual.

#### ad.4. The Revenue Principle

Prinsip ini menganggap bahwa pendapatan dapat diakui untuk dicatat dan dilaporkan bila proses penjualan telah selesai atau jasa telah dilaksanakan. Pembahasan the revenue principle meliputi :

- a. sifat dan komponen pendapatan
- b. pengukuran pendapatan
- c. saat pengakuan pendapatan.

Penjelasan lebih lanjut akan penulis uraikan dibelakang.

### 1.5. Laporan Keuangan

1.5.1. Pengertian Laporan Keuangan Dengan semakin berkembangnya perekonomian, makin banyak pula keputusan ekonomi yang harus diambil berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi-informasi yang digunakan adalah informasi yang dapat dipercaya (reliable).

Penyediaan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen adalah fungsi utama dari bidang

akuntansi. Bagaimana menyediakan bukti-bukti dasar transaksi menjadi informasi yang berguna bagi manajemen adalah bukan hal yang mudah. Diperlukan suatu prosedur, suatu sistem akuntansi untuk dapat mengolah dokumen dasar menjadi informasi yang berarti dan yang lebih penting lagi adalah dapat dipercayanya informasi tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk utama dari pelaporan keuangan ... suatu alat yang prinsipil dalam penyampaian informasi keuangan kepada pihak luar. Laporan keuangan merupakan suatu tabulasi formal dari pos dan nilainya (dalam satuan uang) yang diperoleh dari catatan akuntansi. Laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu atau laporan keuangan dapat pula menunjukkan satu atau beberapa perubahan posisi keuangan perusahaan selama suatu periode. Pos-pos yang diakui dalam laporan keuangan : (1) asset, dan (2) hak/klaim atas asset (hutang, modal), serta (3) pengaruh transaksi dan kejadian serta keadaan lain yang mengakibatkan berubahnya asset dan hak atas asset tersebut.

Laporan keuangan merupakan alat pengakumulasian dan pemrosesan informasi dalam akuntansi keuangan yang secara berkala dikomunikasikan kepada orang-orang yang menggunakannya. Laporan keuangan dimaksudkan untuk

melayani kebutuhan berbagai pemakai, terutama pemilik dan kreditur. Dalam APB Statement No. 4, Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statements of Business Enterprises, bentuk laporan keuangan adalah : "Melalui proses akuntansi keuangan, ..., dan dilaporkan sebagai informasi yang mempunyai dua bentuk dasar yaitu : (1) posisi keuangan, dan (2) Perubahan posisi keuangan, ....".<sup>17</sup>

Berdasarkan APB Statement No. di atas, laporan keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. laporan posisi keuangan berupa Neraca
- b. laporan perubahan posisi keuangan berupa :
  - b.1. laporan laba rugi
  - b.2. perubahan modal sendiri yang digambarkan oleh tiga laporan, yaitu : laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan dan laporan perubahan lain pada modal sendiri.
  - b.3. perubahan lain-lain

Laporan keuangan merupakan hasil suatu proses akumulasi, analisis dan pelaporan sejumlah besar data mengenai aspek aktifitas ekonomis suatu perusahaan.

---

<sup>17</sup> AICPA, APB Statement No. 4 : Konsep Dasar dan Prinsip Akuntansi Yang Melandasi Laporan Keuangan Perusahaan Bisnis, Terjemahan, AK Group, Yogyakarta, 1987, par. 10.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi keuangan. Proses akuntansi keuangan ini diatur oleh prinsip akuntansi yang lazim diterima, yang menentukan informasi yang dicantumkan kedalam laporan keuangan, bagaimana informasi itu diorganisasi, diukur, digabungkan dan disesuaikan, dan akhirnya bagaimana informasi disajikan dalam laporan keuangan.

Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 adalah :

"Laporan keuangan meliputi : Neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain serta materi yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan."<sup>18</sup>

Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi, oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan tersebut merupakan sumber informasi utama guna mengetahui tentang kekayaan, hutang-hutangnya, permodalan maupun kegiatan perkembangan dalam hasil dari operasinya.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan oleh pimpinan perusahaan. Biasanya laporan keuangan tersebut begitu singkat sehingga ada hal-hal yang penting untuk diungkapkan

---

<sup>18</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, loc. cit.

(disclosure) yang diletakkan dalam catatan mengenai laporan keuangan (Note to Financial Statement). Laporan keuangan dan catatan mengenai laporan keuangan harus memenuhi syarat yang wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima yang diterapkan secara konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penyajian yang wajar berarti bahwa tidak boleh ada kesalahan (overstatement atau understatement) yang material dalam penyajian angka-angka dan segala informasi yang seharusnya disajikan agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan (misleading). Laporan keuangan dan catatan mengenai laporan keuangan harus sudah lengkap tanpa keterangan tambahan.

Ronald A.J. Thacker memberikan definisi terhadap laporan keuangan sebagai berikut : "Financial statement is reports primarily designed for decision maker outside the firm which contain information about the financial condition of firm and about the amount of profit earned by the firm."<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Thacker, Ronald A.J, Accounting Principle, Second Edition, Prentice Hall Inc. Englewood cliffs, New York, 1987, halaman 15.



Sedangkan menurut Zaki Baridwan dalam bukunya *Intermediate Accounting*, menyatakan bahwa: "Laporan keuangan adalah hasil akhir dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan."<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian dan definisi tentang laporan keuangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah merupakan daftar yang berisi laporan utama yang memuat tentang posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang disajikan pada akhir suatu periode (biasanya satu tahun), yang laporan itu lazimnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan laba yang ditahan.

1.5.2. Tujuan Laporan Keuangan. Penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dimaksudkan untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik untuk pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan.

---

<sup>20</sup>Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting, Edisi Ketiga*, BPF, Yogyakarta, halaman 1.

Sebagaimana disebutkan SAK, dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (Stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka laporan keuangan harus memenuhi :

1. Asumsi dasar

a. Dasar Akrual

Dengan dasar ini, pengasuh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi - serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang berlangsung.

b. Kelangsungan usaha

Suatu entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara bersinambungan tanpa maksud untuk

---

<sup>21</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1994, halaman 5.

dibubarkan kecuali bila ada bukti sebaliknya. Perusahaan dianggap akan melanjutkan usahanya untuk waktu mendatang yang dapat diduga, tidak bermaksud untuk berkepentingan dengan likwidasi atau penutupan usaha.

## 2. Karakteristik kualitatif laporan keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : dapat dipakai, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

Agar laporan keuangan dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan laporan keuangan, laporan keuangan harus menunjukkan secara wajar keadaan posisi keuangan dan hasil usaha pada atau untuk suatu periode tertentu. Laporan keuangan dapat dikatakan wajar atau layak, apabila :

- a. tidak ada pos-pos yang dinyatakan terlalu besar atau terlalu kecil dalam jumlah material;
- b. disclosure yang cukup sehingga tidak menyesatkan pada pemakai laporan keuangan;
- c. disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim diterima.

Tujuan dasar akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan mengenai

perusahaan bisnis individu yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis. Pelaporan keuangan bukanlah tujuan akhir, namun dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam membuat keputusan bisnis dan ekonomis.

Pelaporan keuangan harus menyediakan :

1. Informasi yang berguna bagi kreditur dan investor serta pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit yang rasional dan keputusan-keputusan lain
2. Informasi yang berguna dalam menaksir jumlah, waktu dan ketidakpastian aliran kas masuk bersih yang akan dipergunakan oleh suatu perusahaan
3. Informasi mengenai sumber-sumber ekonomis perusahaan, klaim atas sumber-sumber dan yang mengubah sumber-sumber ekonomis dan klaim atas sumber-sumber ekonomis.

Bentuk informasi yang harus disediakan laporan keuangan :

1. Informasi mengenai sumber ekonomis, kewajiban dan modal pemilik
2. Informasi prestasi perusahaan melalui pengukuran penghasilan dan *comprehensif income* dan komponen-komponennya berdasarkan akuntansi *accrual*
3. Informasi mengenai bagaimana manajemen mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham.

1.5.3. Arti Pentingnya Laporan Keuangan. Laporan keuangan lazimnya terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Keduanya memiliki sifat berkaitan dan melengkapi. Untuk mengetahui perubahan modal perusahaan, dapat dilihat pada neraca; tetapi untuk mengetahui sebab-sebabnya maka harus melihat pada laporan laba rugi.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan sangatlah membutuhkan adanya informasi yang bersifat menyeluruh tentang kondisi kekayaan dan kegiatan operasi perusahaan tersebut, sehingga mereka dapat mengambil keputusan-keputusan dalam kaitannya dengan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya dengan adanya informasi itu setelah menganalisisnya, maka mereka dapat mengambil langkah-langkah secara tepat. Laporan yang mereka butuhkan adalah laporan keuangan. Tanpa adanya laporan keuangan, maka sulitlah bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah berikutnya secara efektif dan efisien.

1.5.4. Sifat Dan Keterbatasan Laporan Keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi bersifat historis dan menyeluruh, dimana menurut Parwoto Wignjohartojo dinyatakan sebagai berikut :

"Laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara fakta yang telah dicatat (recorded fact), prinsip-prinsip dan kebiasaan didalam akuntansi (accounting convention and postulate), dan pendapat pribadi (personal judgment)".<sup>22</sup>

- a. Fakta yang dicatat (recorded fact). Jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam pos-pos di neraca dan laporan laba rugi merupakan kumpulan dan ringkasan dari catatan historis yaitu catatan-catatan dari peristiwa yang benar-benar telah terjadi di masa yang lalu. Peristiwa yang belum terjadi tidak dicatat dalam proses akuntansi dan tidak tampak dalam jumlah yang dilaporkan dalam pos-pos neraca dan laporan laba rugi. Begitu pula mengenai nilai uang yang dilaporkan dalam pos-pos neraca dan laporan laba rugi tersebut juga didasarkan atas harga yang benar-benar terjadi pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jadi nilai rupiah dalam laporan keuangan tersebut bukan harga sekarang (replacement value) atau harga yang akan datang atau nilai likuiditasnya.
- b. Prinsip-prinsip dan kebiasaan didalam akuntansi (Accounting Convention and Postulate).

---

<sup>22</sup>Parwoto Wignjohartojo, Analisa Laporan Keuangan, Cetakan Pertama, Purna Cipta, Surabaya, 1981, halaman 1.



Pencatatan dalam proses akuntansi dilakukan berdasarkan prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip dan kebiasaan didalam akuntansi yang lazim diterima (Generally Accepted Accounting Principles). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk keseragaman serta memudahkan pencatatan prinsip-prinsip dan kebiasaan didalam akuntansi merupakan aturan atau konsep dasar dan aturan umum untuk melakukan proses akuntansi.

- c. Pendapat Pribadi (Personal Judgment). Dalam mencatat fakta dari suatu transaksi harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi. Pengetrapan prinsip-prinsip akuntansi ini masih memberikan kemungkinan untuk mengadakan pemilihan berdasarkan personal judgment. Dalam menggunakan personal judgment tersebut, maupun prosedur atau metode yang dipilih asal masih dalam ruang lingkup prinsip akuntansi, masih diperkenankan dan harus dilaksanakan secara konsisten. Tetapi apabila perubahan konsistensi diungkapkan dalam laporan keuangan, maka pembaca laporan keuangan tersebut mengerti mana yang diterapkan.

Jadi bagi mereka yang tidak biasa atau tidak memahami akuntansi tentu akan menganggap bahwa laporan keuangan itu adalah suatu daftar yang merupakan atau yang berdasarkan fakta-fakta yang memperlihatkan nilai dari

perusahaan secara keseluruhan dengan pasti dan tepat sesuai kondisi ekonomi saat itu.

Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan itu mempunyai berbagai keterbatasan, antara lain :

- "1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. Karena itu jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan likuidasi atau realisasi dimana dalam interim report ini terdapat/terkandung pendapat-pendapat pribadi (personel judgment) yang dilakukan oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan.
2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya daftar penyusunannya dengan standart nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat berdasarkan konsep going concern atau anggapan bahwa perusahaan akan berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai historis atau harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (book value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang atau nilai gantinya.
3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. Jadi suatu analisa yang memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian terhadap perubahan harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru (misleading).

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang (dikuantifisir). Misalnya reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan tidak dapat dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak pembelian maupun penjualan yang telah disetujui, kemampuan serta integritas manager dan sebagainya."<sup>23</sup>

#### 1.6. Pendapatan

Penentuan penghasilan menurut akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkaitan pendapatan dengan biaya suatu perusahaan bisnis untuk suatu periode akuntansi. Pendapatan suatu perusahaan pada umumnya ditentukan secara independen dengan menerapkan prinsip realisasi. Biaya ditentukan dengan menerapkan prinsip pengakuan biaya atas dasar hubungan antara harga pokok perolehan dengan pendapatan yang ditentukan secara independen atau dengan periode akuntansi.

Pengukuran dan pelaporan income periode suatu perusahaan menjadi semakin penting. Berbagai pihak membutuhkan Income Statement untuk dapat mengevaluasi hasil aktivitas perusahaan atau untuk dapat menetapkan nilai perusahaan.

---

<sup>23</sup> Munawir, Analisa Laporan Keuangan, Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1981, halaman 9-10.

1.6.1. Pengertian Pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu elemen dasar hasil usaha suatu perusahaan bisnis. Secara terperinci PSAK No. 23 memberikan definisi pendapatan sebagai berikut :

"Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal."<sup>24</sup>

Dalam Accounting Principle Standard Board No. 4 dinyatakan sebagai berikut :

"Pendapatan...kenaikan bruto aktiva atau penurunan bruto utang yang diakui atau diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim diterima sebagai akibat jenis-jenis aktifitas yang menjurus kearah perolehan laba suatu perusahaan bisnis yang dapat merubah modal sendiri."<sup>25</sup>

Dari dua definisi mengenai pendapatan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Aktiva perusahaan dapat bertambah melalui berbagai cara tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan timbulnya pendapatan, misal : pembelian aktiva, investasi oleh pemilik, pinjaman atau koreksi laba rugi periode lalu.

---

<sup>24</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.23, Buku Dua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1994, halaman 23.3.

<sup>25</sup> AICPA, op. cit., par. 134.

2. Pendapatan perusahaan dapat ditunjukkan dengan aliran dana yang masuk ke perusahaan dari langganan atau konsumen sebagai balas jasa atas produk yang telah diberikan oleh perusahaan kepada langganan atau konsumen.
3. Kenaikan aktiva atau penurunan utang yang dimaksudkan sebagai pendapatan berkaitan dengan perubahan sumber daya ekonomis dan kewajiban ekonomis. Bagaimanapun juga, pendapatan tidak meliputi seluruh kenaikan aktiva dan/atau penurunan utang yang diakui.
4. Pendapatan hanya dihasilkan dari kegiatan perusahaan yang mengarah pada perolehan laba yang dapat menambah modal sendiri.
5. Pendapatan diperoleh dari tiga aktifitas umum, yaitu :
  - (a) penjualan produk, (b) penyerahan jasa dan perijinan lain untuk menggunakan sumber daya ekonomi perusahaan yang menghasilkan bunga, sewa, royalti dan sejenisnya, (c) penjualan sumber daya ekonomis selain produk.

1.6.2. Komponen Pendapatan. Mengenai komponen pendapatan, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai apa yang seharusnya dimaksudkan sebagai pendapatan, yaitu pandangan secara luas atau komprehensif dan pandangan secara sempit.



Menurut pandangan yang luas atau komprehensif, pendapatan itu meliputi seluruh hasil dari aktifitas usaha dan aktifitas investasi. Seluruh perubahan dalam aktiva netto selain transaksi modal yang dilaporkan selama satu periode harus dianggap sebagai pendapatan. Pandangan ini menunjukkan pendapatan sebagai seluruh perubahan aktiva netto yang diakibatkan oleh aktifitas atau kegiatan penciptaan pendapatan dan juga keuntungan lain akibat penjualan aktiva tetap dan investasi.

Accounting Terminology Bulletin No.2 menyatakan sebagai berikut :

"Revenue result from the sale of goods and the rendering of services and is measured by the change made to customers, ...for goods and services or exchange of asset (other the stock in trade), interest and devidend earned on investment, and other increases in the owner equity except those arising from the capital contributions and capital adjustment."<sup>26</sup>

Dalam pandangan yang sempit, hanya aktifitas yang menciptakan pendapatan saja yang menjadi unsur pendapatan; sedangkan pendapatan investasi (deviden) dan keuntungan penjualan aktiva tidak termasuk pendapatan. Jadi ada perbedaan yang jelas antara pendapatan dan keuntungan.

---

<sup>26</sup> AICPA, Accounting Terminology Bulletin No. 2, Proceeds Revenue, Income, Profit and Earning, dikutip dari Ahmed Belkaoi, halaman 111.



PSAK No. 23 menyatakan sebagai berikut :

"Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas,<sup>27</sup> yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal."

Melihat unsur-unsur pendapatan menurut PSAK No. 23, berarti PSAK No. 23 menganut pandangan yang luas. Sebab pendapatan investasi atau deviden dan keuntungan dari penjualan aktiva tetap diakui sebagai pendapatan.

1.6.3. Pengukuran Pendapatan. Pengukuran pendapatan didasarkan atas nilai dari produk atau jasa yang dipertukarkan dalam suatu transaksi yang bebas. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 menyatakan sebagai berikut : "Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima atau yang dapat diterima".<sup>28</sup>

Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan.

---

<sup>27</sup> Ikatan Akuntan Indonesia , loc. cit.

<sup>28</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, op. cit., halaman 23.14.

Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari khas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari khas yang diterima atau yang dapat diterima.

Bila barang atau jasa dipertukarkan (barter) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Bila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa yang tidak serupa, pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.

1.6.4. Saat Pengakuan Pendapatan. Pengakuan adalah proses pencatatan atau pemasukan secara formal suatu item/pos ke dalam laporan keuangan perusahaan sebagai asset, hutang, pendapatan, biaya atau sejenisnya.

Sebagai ketentuan umum, pengakuan pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penjualan barang

Barang yang dimaksud disini meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pemgecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 dalam paragraf 38 menyatakan sebagai berikut :

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi :

- (a) perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- (b) perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- (c) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- (d) besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut;
- (e) biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.<sup>29</sup>

Untuk menentukan kapan suatu perusahaan telah memindahkan resiko signifikan dan manfaat kepemilikan kepada pembeli memerlukan pengujian keadaan transaksi tersebut. Pada umumnya pemindahan resiko dan manfaat kepemilikan bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau penguasaan atas barang tersebut kepada

---

<sup>29</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, op. cit., halaman 23.15

pembeli. Hal ini terjadi pada kebanyakan penjualan eceran. Dalam hal lain pemindahan resiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut.

Jika perusahaan tersebut menahan resiko signifikan dari kepemilikan, transaksi tersebut bukanlah suatu penjualan dan pendapatan tidak diakui. Suatu perusahaan dapat menahan resiko kepemilikan yang signifikan dengan berbagai cara, misalnya :

- (a) bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya;
- (b) bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan.
- (c) bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan.
- (d) bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan terjadi retur.

Jika perusahaan hanya menahan resiko tidak signifikan atas kepemilikan, transaksi tersebut adalah suatu penjualan dan pendapatan diakui.

## b. Penjualan Jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 dalam paragraf 39-40 menyatakan sebagai berikut :

39 Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi :

- (a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
- (b) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
- (c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal, dan
- (d) Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

40 Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, loc. cit.



Pengakuan pendapatan dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan bekerja suatu perusahaan dalam suatu periode.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Namun bila suatu ketidakpastian timbul mengenai ke elektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih atau jumlah yang pemilihannya (recovery) tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu beban dari pada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula.

Suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang andal setelah perusahaan tersebut mencapai persetujuan mengenai hal-hal berikut dengan pihak lain dalam transaksi tersebut :

- (a) hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut;
- (b) imbalan yang harus dipertukarkan; dan
- (c) cara dan persyaratan penyelesaian.



Untuk menentukan tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat digunakan dengan berbagai metode. Suatu perusahaan menggunakan metode yang dapat mengukur dengan andal jasa yang diberikan. Tergantung pada sifat transaksi, metode tersebut dapat meliputi :

- (a) survei pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- (b) jasa yang telah dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang harus dilakukan;
- (c) proporsi biaya yang terjadi hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilaksanakan hingga tanggal tertentu dimasukkan dalam biaya yang terjadi hingga tanggal tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilakukan atau yang harus dilakukan dimasukkan kedalam estimasi total biaya transaksi tersebut.

Untuk tujuan praktis bila jasa dihasilkan oleh sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode tertentu, pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu kecuali jika ada bukti bahwa ada metode lain yang lebih baik yang dapat mencerminkan tingkat penyelesaian.

Selama tahap awal suatu transaksi, seringkali terjadi bahwa hasil transaksi tersebut tidak dapat

diestimasi dengan andal. Namun demikian, besar kemungkinan terjadi bahwa perusahaan tersebut akan memperoleh kembali biaya transaksi yang terjadi. Oleh karena itu pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan biaya yang telah terjadi yang diharapkan dapat diperoleh kembali. Karena hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal, tidak ada laba yang diakui.

Apabila terjadi hasil dari transaksi tidak dapat diestimasi dengan andal dan kecil kemungkinan biaya yang terjadi akan diperoleh kembali, pendapatan tidak diakui dan biaya yang terjadi diakui sebagai beban.

#### c. Bunga, Royalti dan Deviden

Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan-pendapatan dalam bentuk :

- (a) *bunga*-pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan;
- (b) *royalti*-pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya, paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer; dan
- (c) *deviden*-distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 pada paragraf 28-29 menyatakan sebagai berikut:

28 Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan deviden harus diakui atas dasar yang di jelaskan dalam paragraf 29 bila :

- (a) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan; dan
- (b) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

29 Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut :

- (a) bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut;
- (b) royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
- (c) dalam metode biaya (cost method), deviden tunai harus diakui bila pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.<sup>31</sup>

1.6.5. Penyajian dalam laporan keuangan. Laporan laba rugi pada umumnya terdiri dari bagian-bagian yang menimbulkan pendapatan bersih selama periode tertentu. Semua unsur pendapatan tercakup didalamnya. Walaupun demikian suatu perbedaan dapat dibuat antara hasil operasi utama dengan elemen lain yang mempengaruhi pendapatan bersih.

Kategori besar yang termasuk dalam laporan laba rugi adalah :

1. Pendapatan dari penjualan barang/jasa.
2. Harga pokok penjualan dan pengeluaran pemberian jasa.

---

<sup>31</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, op. cit., halaman 23.16

3. Biaya-biaya operasi.
4. Pendapatan dan pengeluaran lain.
5. Pajak pendapatan.
6. Laba bersih.

Terdapat dua bentuk penyajian laporan laba rugi yaitu :

- a. Multiple step.
  - b. Single step.
- ad.a. Multiple step.

Penyusunan laporan laba rugi menurut multiple step berturut-turut dimulai dari : penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor penjualan, pengeluaran operasi, pengeluaran administrasi dan umum, pendapatan operasi, pendapatan dan pengeluaran lain, pendapatan sebelum pajak, pajak pendapatan, dan pendapatan bersih.

Contoh bentuk multiple step adalah sebagai berikut :

PT XYZ

Laporan laba rugi

31 Des. 19xx

```

=====
Penjualan :                               xx
(-) Retur dan potongan penjualan         (xx)
Harga pokok penjualan :
  Persediaan awal                         xx
  Pembelian                               xx
  Transport masuk                         xx
                                          -----
                                          xx
  (-) Retur dan potongan pembelian       (xx)
                                          -----
                                          xx

Barang dagang yang siap dijual           xx
(-) Persediaan akhir                     (xx)
                                          -----
Laba kotor penjualan                     xx

Biaya-biaya :
  Biaya operasi                           xx
  Biaya administrasi/umum                 xx
                                          -----
                                          (xx)

Pendapatan operasi                       xx
Pendapatan dan pengeluaran lain          xx
                                          -----

Pendapatan sebelum pajak                 xx
Pajak pendapatan                         xx
                                          -----

Pendapatan bersih                         xx
=====

```

## ad. b. Single step

Dalam single step semua pendapatan dan pengeluaran dikelompokkan dalam kelompok masing-masing, yaitu kelompok pendapatan dan kelompok biaya.

Contoh single step adalah sebagai berikut :

PT XYZ

## Laporan laba rugi

31 Des. 19xx

=====

## Pendapatan :

Pendapatan bersih	xx	
Pendapatan bunga dan deviden	xx	
	<u>          </u>	xx

## Pengeluaran :

Harga pokok penjualan	xx	
Biaya penjualan	xx	
Biaya administrasi/umum	xx	
	<u>          </u>	xx

Pendapatan bersih		<u>          </u>
		xx
		====

=====

2. Pedoman Pembahasan

Perkiraan "sewa modal dalam penyelesaian" bukan dimaksudkan oleh Perum Pegadaian untuk menghapus pendapatan y.mh. diterima dan juga tidak berfungsi



sebagai pembuatan cadangan. Sehingga mestinya harus tetap dianggap sebagai pendapatan pada tahun berjalan. Jadi penerimaan kas dari sewa modal dalam penyelesaian pada tahun berikutnya tidak boleh dianggap sebagai pendapatan pada periode berikutnya tersebut.

Bila nasabah ingkar sehingga tidak menebus barang jaminan, maka pada saat itu Perum Pegadaian sebagai kreditur mempunyai hak atas barang jaminan nasabah. Dengan demikian Perum Pegadaian tentunya telah dapat mengakui suatu pendapatan atas pelelangan barang yang akan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebesar pinjaman yang diberikan ditambah sewa modal yang harus dibayar oleh debitur; meskipun belum diterima secara kas. Hasil pelelangan barang jaminan yang diterima secara kas pada periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai pendapatan pada periode berikutnya tersebut.

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1. Definisi Operasional

1. Pengakuan adalah tindakan untuk menentukan bahwa sesuatu (dalam hal ini pendapatan) menjadi bagian milik perusahaan.
2. Pendapatan adalah aliran dana yang masuk ke perusahaan dari konsumen atau langganan sebagai penukar produk perusahaan, baik berupa barang atau jasa. Karena itu pos pendapatan digunakan untuk mencerminkan dan

mengukur tambahan kekayaan perusahaan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan.

3. Ketepatan Pengakuan Pendapatan adalah ketetapan dalam hal waktu atau saat yang tepat dimana suatu pendapatan harus diakui, yaitu suatu waktu tertentu dimana keputusan yang paling kritis diambil atau pada saat tugas yang paling sulit dilaksanakan. Selain itu ketepatan pengakuan pendapatan juga dimaksudkan untuk menilai komponen atau unsur apa saja yang boleh dimaksudkan sebagai pendapatan dan apa saja yang tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan.
4. Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan kekayaan, kewajiban serta modal suatu badan usaha pada suatu saat tertentu dan hasil operasi yang diperoleh selama suatu periode tertentu.
5. Wajar adalah sesuatu yang tidak dinyatakan terlalu rendah atau terlalu tinggi.
6. Perum Pegadaian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini.

Jadi kesimpulan dari definisi operasional adalah suatu ketepatan waktu yang bagaimana bagi pengakuan suatu pendapatan, dalam usaha mencapai suatu bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima yang harus dibuat oleh Perum Pegadaian.

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh penulis untuk mengadakan pembahasan data kualitatif dan kuantitatif dapat digolongkan menjadi :

1. Data primer, yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan pengamatan langsung dan wawancara dengan pejabat perusahaan.
2. Data sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan atas beberapa literatur sebagai landasan teori dan bahan analisis.

### 3.3. Prosedur Pengumpulan Data

#### 1. Survey Pendahuluan

Untuk mengetahui permasalahan yang ada secara garis besarnya dengan jalan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan yang dijadikan obyek penelitian.

#### 2. Survey Kepustakaan

Suatu tahap dimana penulis berusaha mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dan dikumpulkan untuk dijadikan dasar dalam pembahasan skripsi ini.

#### 3. Survey Lapangan

Untuk mendapatkan data secara langsung ke perusahaan yang bersangkutan melalui wawancara atau interview dengan pejabat perusahaan, serta melihat langsung

dokumen-dokumen, buku laporan dan prosedur dari aktivitas Perum Pegadaian.

### 3.4. Teknik Analisis

1. Analisis diskriptif, dimaksudkan untuk menggambarkan secara garis besar keberadaan tata pekerjaan Perum Pegadaian melalui pendekatan teoritis, yaitu teori-teori yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan.
2. Analisis komparatif, dimaksudkan untuk membandingkan teori dengan penerapan pengakuan pendapatan pada Perum Pegadaian. Dari perbandingan ini, ditarik kesimpulan, diberikan saran.

### BAB III

## A N A L I S I S

### 1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

#### 1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian

Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Pegadaian timbul pertama kali pada abad pertengahan di Lombardia (Italia Utara) yang kebanyakan diusahakan oleh orang Yahudi.

Di Indonesia Pegadaian dikenal sebagai suatu lembaga perkreditan yang bergerak dengan jalan memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak. Pegadaian sejak jaman VOC tahun 1746 sampai sekarang mengalami 4 (empat) jaman pemerintahan, yaitu :

1. Pegadaian jaman VOC (1746-1811).
2. Masa penjajahan Inggris (1811-1816).
3. Masa penjajahan Belanda (1816-1942).
4. Masa sesudah kemerdekaan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Pegadaian, dibawah ini diuraikan secara singkat :

#### a. Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian.

Bentuk usaha Pegadaian di Indonesia mulanya diselenggarakan oleh pihak swasta sampai pada akhir abad 19. Berdirinya rumah-rumah gadai disini, sama

seperti negara-negara lain, mengambil keuntungan dari kemiskinan rakyat. Karena hampir tidak berbeda, maka bisa dikatakan sebagai praktek lintah darat, yaitu rentennir yang "diresmikan" oleh pemerintah Belanda.

Dengan adanya politik etis, rumah gadai dikoordinasikan oleh pemerintah Hindia Belanda, menjadi Rumah Gadai Negeri pada 1 April 1901, dengan kantor pertama di Sukabumi.

Melampaui masa pendudukan Jepang dimana banyak rumah gadai dibumi hanguskan, setelah kemerdekaan statusnya dialihkan menjadi Jawatan Pegadaian Negeri (status ini sama dengan instansi pemerintah yang tunduk kepada ICW dan IBW).

Lalu ketika tahun 1960 keluar UU. No. 19/1960 dimana semua perusahaan Belanda dialihkan menjadi perusahaan negara, Jawatan Pegadaian Negeri dijadikan PN (Perusahaan Negara) Pegadaian.

Tahun 1969, status Pegadaian berubah lagi. Kali itu menjadi Inpres Perjan, menyusul keluarnya Intruksi Presiden No. 17 tahun 1967 yang mengelompokkan BUMN atas Perjan, Perum dan Persero. Dalam status Perjan inilah Pegadaian mengalami kesulitan-kesulitan untuk berkembang. Pemerintah akhirnya memutuskan mengalihkan status Pagadaian menjadi Perum (Perusahaan Umum).



b. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian merupakan kelanjutan dari Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Sifat, tujuan dan lapangan usaha perusahaan seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1990 pasal 5 dan 6 adalah :

1. Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum yang sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan usaha.
2. Perusahaan bertujuan :
  - a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum gadai.
  - b. Untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Berpatokan pada prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat.
- b. Usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Setelah pengalihan bentuk Pegadaian menjadi Perum, terlihat perkembangan yang berarti. Direksi sekarang telah mempunyai otonomi karena kekayaan negarapun dipisahkan. Otonomi ini amat penting artinya bagi Pegadaian. Dengan otonomi Pegadaian lebih fleksibel mengatur organisasi kedalam. Perusahaan juga lebih leluasa mengatur operasionalnya.

Perkembangan yang pesat dari Perum Pegadaian juga bisa dilihat dari perkembangan jumlah cabangnya. Apabila sebelum April 1990 Pegadaian memiliki 483 cabang, maka kini sudah mencapai 536 cabang. Perum Pegadaian mempunyai 14 kantor Daerah yang merupakan kelanjutan dari Kantor Daerah Inspeksi pada masa Perjan.

Dari sisi permodalan, Perum Pegadaian kini sudah mampu meminjam ke bank. Pemerintah sendiri sudah bertekad untuk membantu pelaksanaan misi yang diemban Perum Pegadaian. Hal ini terbukti dengan adanya tambahan Penyertaan Modal Pemerintah. Belum cukup, Perum Pegadaian juga menerbitkan obligasi.

Proyeksi tahun-tahun mendatang disamping dalam rangka perluasan pelayanan, Perum Pegadaian menargetkan peningkatan omzet. Strategi lain adalah meningkatkan pelayanan sebaik mungkin. Artinya, meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat lebih senang datang ke Pegadaian. Istilahnya memasyarakatkan Pegadaian, sehingga tidak ada orang yang malu lagi datang ke Pegadaian. Ini sesuai dengan motto Pegadaian yaitu mengatasi masalah tanpa masalah.

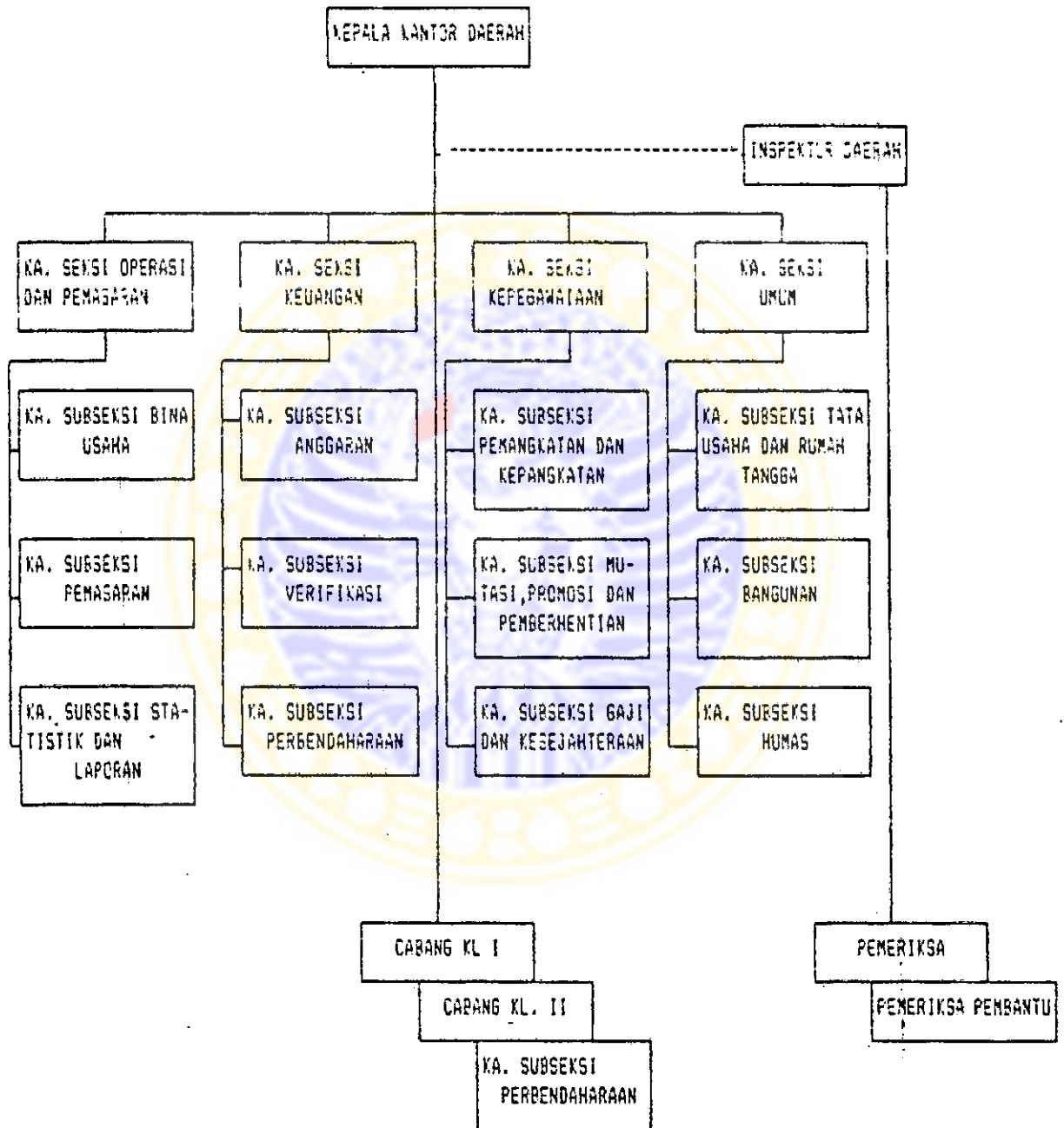
#### 1.2. Struktur Organisasi Kantor Daerah Perum Pegadaian

Struktur organisasi yang baik merupakan hal penting bagi perusahaan. Adanya struktur organisasi akan memperjelas fungsi dan tanggungjawab masing-masing bagian dalam mencapai tujuan perusahaan.

Struktur organisasi Kantor Daerah Perum Pegadaian dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 2

## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DAERAH PERUM PEGADAIAN



SK. Direksi

No. Smm. 2/1/29 Tgl. 27 - 10 - 1990

Kantor Daerah Perum Pegadaian adalah Perum Pegadaian di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dari Kantor Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Daerah

Mengkoordinasikan pengelolaan, pengawasan, pembukuan, keuangan, kepegawaian dan pemeliharaan asset perusahaan serta pengembangan usaha di daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pendapatan dan citra perusahaan di daerah.

2. Kepala Seksi Operasi dan Pemasaran

Memantau, mengevaluasi, meneliti pelaksanaan operasional perusahaan serta menyajikan laporan perkembangan usaha perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkat pangsa pasar dan pendapatan perusahaan.

3. Kepala Subseksi Pemasaran

Meneliti dan mengkaji kegiatan pemasaran dan mendistribusikan serta memelihara sarana promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pangsa pasar.

4. Kepala Subseksi Bina Usaha

Meneliti dan mengevaluasi perkembangan operasional

Cabang serta menyusun target omzet dan pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan operasional berjalan sesuai dengan rencana Perusahaan.

5. Kepala Subseksi Statistik

Mengelola data operasional serta mengevaluasi dan menyajikan statistik perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan informasi perkembangan perusahaan.

6. Kepala Seksi Keuangan

Mengurus anggaran, perbendaharaan, penagihan, pajak, penyediaan dan alokasi anggaran serta melakukan verifikasi dokumen keuangan serta menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan perusahaan.

7. Kepala Subseksi Anggaran

Menyiapkan rencana kerja, mengurus alokasi kebutuhan modal kerja dan investasi serta mengevaluasi dan melaporkan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pengalokasian modal kerja berjalan lancar.

8. Kepala Subseksi Verifikasi dan Pembukuan

Menyelenggarakan verifikasi terhadap laporan dokumen keuangan serta melakukan pembukuannya berdasarkan peraturan yang berlaku agar laporan keuangan sesuai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.



9. Kepala Subseksi Perbendaharaan

Menyelenggarakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengurusan piutang dan kas kredit serta penyelesaian pembayaran pajak dan iuran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pengelolaan keuangan daerah berdayaguna dan berhasilguna.

10. Kepala Seksi Kepegawaian

Memproses pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, KGB, mutasi, promosi, pemberhentian, hukuman disiplin, penggajian dan perjalanan dinas serta kesejahteraan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan penghargaan terhadap prestasi pegawai.

11. Kepala Subseksi Pengangkatan dan Kepangkatan

Menyiapkan usul formasi, pengadaan dan pengangkatan serta memproses kepangkatan, kenaikan gaji berkala dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam rangka pembinaan pegawai.

12. Kepala Subseksi Mutasi, Promosi dan Pemberhentian

Memproses usul mutasi, promosi MPP, pensiun, pemberhentian dan tindakan indisipliner pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka pembinaan kepegawaian.

13. Kepala Subseksi Gaji dan Kesejahteraan

Memproses penggajian, kesejahteraan dan perjalanan Dinas Pegawai Kantor Daerah dan Cabang berdasarkan peraturan yang berlaku agar pembayaran dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

14. Kepala Seksi Umum

Memproses ketata usahaan, rumah tangga daerah, usulan pembangunan atau perbaikan serta menyelenggarakan kehumasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan penyediaan sarana kerja yang memadai.

15. Kepala Subseksi tata Usaha dan Rumah Tangga

Mengurus administrasi persuratan, pengadaan kebutuhan kantor dan menyelenggarakan kebersihan, ketertiban dan keamanan serta mengatur penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional.

16. Kepala Subseksi Bangunan

Memproses, mengurus dan menyelenggarakan pembangunan atau perbaikan bangunan dan prasarana bangunan serta penata usahaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyediaan sarana kerja yang memadai dan tertib administrasi.

17. Kepala Subseksi Humas

Menyelenggarakan Kehumasan dan mengurus penyelesaian masalah hukum serta kepustakaan di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

18. Inspektur Daerah

Mengkoordinasikan pelaksanaan perkunjungan pekerjaan para Pemeriksa dan menyiapkan laporan Kepala Kantor Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan pemeriksaan intern berdasarkan pedoman pemeriksaan dalam rangka mengamankan asset perusahaan.

19. Pemeriksa

Menyiapkan program dan melakukan perkunjungan pekerjaan ke kantor Cabang serta bekerjasama dengan instansi terkait berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka mengamankan asset perusahaan.

20. Pemeriksa Pembantu

Menyiapkan program dan melakukan perkunjungan pekerjaan ke kantor Cabang serta bekerjasama dengan instansi terkait berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka mengamankan asset perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan perusahaan Kepala Kantor Daerah dibantu oleh Kepala Seksi Keuangan. Kepala Kantor Daerah bertugas mengkoordinasikan

pengurusan keuangan dan pembukuan kegiatan operasional perusahaan di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan di daerah.

Sedangkan Kepala Seksi Keuangan dengan dibantu bagian-bagian yang ada dibawahnya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dokumen keuangan dan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar laporan keuangan sesuai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
2. Memeriksa kebenaran dan kewajaran dokumen keuangan dan pembukuan.
3. Menyelenggarakan pembukuan dan laporan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
4. Menyelenggarakan penyimpanan dokumen dan pemutahiran data keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan data keuangan.

### 1.3. Prosedur Akuntansi Kredit

#### 1.3.1. Kebijakan Akuntansi.

- a. Pengertian Piutang Pinjaman Yang Diberikan. Piutang pinjaman yang diberikan adalah jasa yang diberikan kepada pihak lain yang timbul sebagai akibat adanya transaksi gadai atau perjanjian kredit.

b. Klasifikasi. Piutang Usaha di Perum Pegadaian terdiri dari golongan A, B, C, D dan E ( SK. Direksi Nomor OPP. 3/15/36 tanggal 15 Oktober 1993 ).

Sedangkan piutang non usaha, meliputi tagihan yang timbul dari transaksi diluar operasi perusahaan yang terdiri dari piutang pegawai dan piutang non usaha lainnya.

c. Saat pengakuan. Mutasi atas pinjaman yang diberikan diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, yaitu berupa:

1. Pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah.
2. Penerimaan pelunasan kredit dari nasabah

Piutang non usaha diakui dan dicatat pada saat timbulnya tagihan perusahaan, berdasarkan bukti-bukti tagihan yang bersangkutan.

d. Penilaian. Besarnya pinjaman yang diberikan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pinjaman yang diberikan dinyatakan sebesar nilai nominal uang pinjaman yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit ( SBK ) atau Surat Perjanjian Kredit.
2. Terhadap pinjaman yang diberikan untuk disisihkan karena kepentingan hukum yang barang jaminannya dipinjam/disita oleh polisi sampai dengan jatuh tempo. Penghapusan pinjaman yang diberikan dilakukan pada saat putusan pengadilan.

Piutang non usaha dinyatakan sebesar jumlah yang harus ditagih dari pihak, berdasarkan bukti tagihan yang bersangkutan.

### 1.3.2. Piutang Pinjaman Yang Diberikan.

a. Klasifikasi Pinjaman. Dalam pemberian pinjaman kepada nasabah, barang jaminan kredit disesuaikan dengan uang pinjaman ( UP ) yang dibagi menjadi 5 ( lima ) golongan, yaitu :

1. Golongan A uang pinjaman Rp. 5.000 s/d Rp. 40.000.
2. Golongan B uang pinjaman Rp. 40.000 s/d Rp. 150.000.
3. Golongan C uang pinjaman Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000.
4. Golongan D uang pinjaman Rp. 510.000 s/d Rp. 2.500.000.
5. Golongan E uang pinjaman sesuai perjanjian kredit.

Sedangkan untuk besarnya jasa kredit ( sewa modal ) dan tenggang waktu pelunasan berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



TABEL 1  
PERSENTASE SEWA MODAL

Gol.	Besarnya uang Pinjaman (Rp)	Jangka waktu kredit (hari)	Besarnya sewa modal per 15 hari (%)
A	5.000- 40.000	120	1,25
B	40.500- 150.000	120	1,75
C	150.000- 500.000	120	1,75
D	510.000-2.500.000	120	1,75

Sumber : Kanda XI Perum Pegadaian.

b. Ketentuan Besarnya Uang Pinjaman. Besarnya pinjaman kepada nasabah ditentukan sebagai berikut :

1. Golongan barang jaminan A/B adalah sebesar 84 % dari nilai taksiran barang jaminan.
2. Golongan barang jaminan C/D adalah sebesar 89 % dari nilai taksiran barang jaminan.

### 1.3.3. Prosedur Pemberian Pinjaman

No. Pelaksanaan	Langkah	Aktivitas
1. Penaksir	1	Menerima barang jaminan dari nasabah dan menetapkan besarnya nilai taksiran dan uang pinjamannya. Untuk jumlah tertentu diputuskan oleh Kuasa Pemutus Kredit (KPK).
	2	Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada Buku Taksiran Kredit (BTK) dan menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK).
	3	SBK dibuat rangkap 2 (dua) dan didistribusikan sebagai berikut :

- Lembar pertama (asli) diserahkan kepada nasabah.
- Kitir 'Tengah dan Luar' lembar kedua ditempelkan pada barang jaminan.
- Kitir 'Dalam' serta 'Badan' lembar kedua dikirimkan ke Kasir.

## 2. Kasir

4 Menerima SBK lembar 1 (asli) dari nasabah dan SBK dwilipat dari Penaksir selanjutnya.

5 Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf dan tanda 'Bayar' pada SBK asli dan lembar kedua. SBK lembar pertama (asli) beserta uangnya diserahkan kepada nasabah.

6 SBK lembar kedua didistribusikan sebagai berikut :

- 'Badan' SBK diserahkan ke Bagian Administrasi/Pegawai Pencatat Buku Kredit dan Pelunasan.
- Kitir bagian 'Dalam' Surat Bukti Kredit sebagai dasar pencatatan ke Laporan Harian Kas (LHK).

## 3. Bagian Administrasi

7 Mencatat semua transaksi pemberian kredit semua golongan berdasarkan 'Badan' SBK yang diterima dari Kasir dalam Kas Kredit (KK) rangkap 2, selanjutnya dibukukan ke :

- Buku Kredit dan Pelunasan (BKP), rangkap 2 (karbonais).
- Buku Kas (BK) rangkap 2 .
- BK lembar 1 dengan lampiran KK lembar 1

- dilampiri asli Rekapitulasi Kredit ke Kantor Daerah.
- BK lembar 2, KK lembar ke-2 dan Rk lembar 23 sebagai arsip Kantor Cabang.
- 8 Pada akhir tutup kantor, berdasarkan 'Badan' SBK dan BKP buat Rekapitulasi Kredit (RK) dan dicatat pada Ikhtisar Kredit dan Pelunasan (IKP).
4. Bagian Gudang
- 9 Menerima Barang Jaminan (BJ) yang telah ditempelkan Kitir SBK bagian 'Tengah' dan 'Luar' dari Penaksiran dan BKP lembar 2 (karbonais) dari Bagian Administrasi.
- 10 Cocokkan BJ yang telah ditempelkan kitir SBK bagian 'Tengah' dan 'Luar' dengan BKP lembar 2 (karbonais).
- 11 - Apabila telah sesuai antara BJ yang diterima hari itu dengan BKP lembar 2 (karbonais); selanjutnya dicatat dalam Buku Gudang (BG).
- 12 Pada akhir jam kantor Saldo BG dicocokkan dengan IKP.

Formulir-formulir yang terkait :

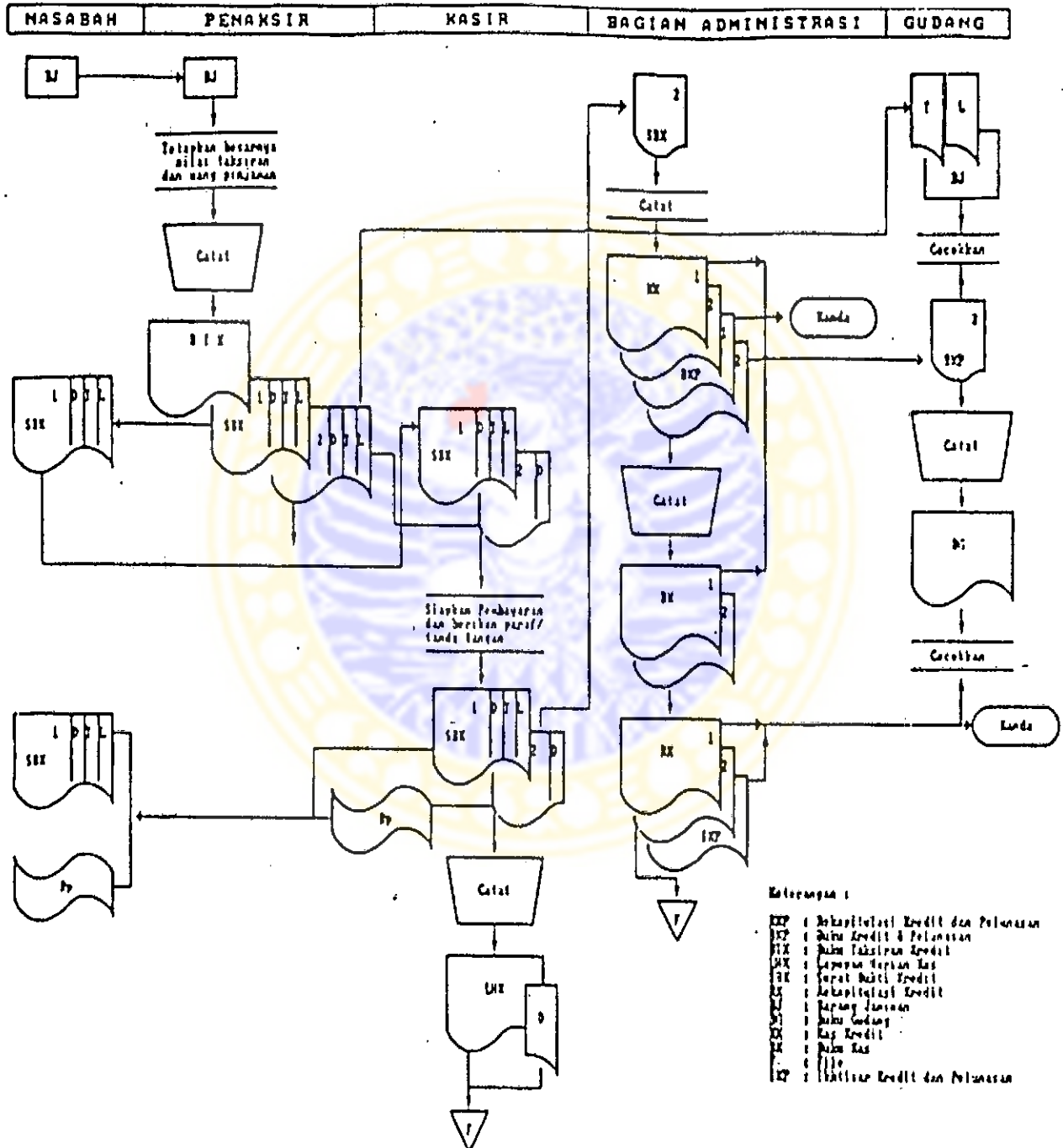
1. Kas Kredit
2. Buku Kas
3. Laporan Harian Kas
4. Surat Bukti Kredit
5. Buku Taksiran Kredit
6. Buku Kredit dan Pelunasan
7. Rekapitulasi Kredit
8. Ikhtisar Kredit dan Pelunasan

Prosedur pemberian pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut :



GAMBAR 3.

PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN



Sumber : Kanda XI Perum Pegadaian

### 1.3.4. Prosedur Pelunasan Pinjaman Yang Diberikan

No. Pelaksanaan	Langkah	Aktivitas
1. Nasabah	1	Menyerahkan Surat Bukti Kredit kepada pegawai penghitung sewa modal.
2. Pegawai Penghitung Sewa Modal	2	Memeriksa keabsahan Surat Bukti Kredit asli dari nasabah, menghitung sewa modalnya dan mencantumkan pada 'badan' Surat Bukti Kredit disertai parafnya
	3	Menyerahkan kembali Surat Bukti Kredit yang telah dihitung sewa modalnya kepada nasabah.
3. Kasir	4	Memeriksa Surat Bukti Kredit asli tentang kelengkapan data dan keabsahannya.
	5	Menerima pembayaran dari nasabah (pokok pinjaman dan sewa modalnya).
	6	Membubuhkan cap 'lunas' dan memberi paraf pada badan Surat Bukti Kredit dan kitir-kitirnya.
	7	Mendistribusikan Surat Bukti Kredit tersebut sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitir Bagian 'Dalam' Surat Bukti Kredit disimpan dan sebagai dasar pencatatan pada Laporan Harian Kas (LHK).</li> <li>- 'Badan' SBK diserahkan kepada Bagian Administrasi sebagai dasar pencatatan pada Buku Kredit dan Pelunasan (BKP).</li> </ul>



- Kitir 'luar' diserahkan kepada nasabah untuk pengambilan barang jaminan dari penyimpan/pemegang gudang.
- Kitir 'tengah' diserahkan kepada penyimpan barang/pemegang gudang sebagai dasar pengeluaran barang jaminan.

#### 4. Bagian Administrasi B

Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar SBK 'Badan' yang diterima dari kasir, sesuai dengan golongan dan bulan kreditnya pada Buku Kredit pelunasan (BKP), Kas Debet (KD) rangkap 2, selanjutnya pada akhir jam kerja dibukukan dalam :

- Buku Kas (BK) rangkap 2
- Buku kontrol Perlunasan (BKPI)
- Ikhtisar Kredit dan Pelunasan (IKP)

9 Setiap minggu BK lembar 1 dengan lampiran KD lembar 1 dan diteruskan ke Kantor Daerah.

10 BK lembar 2 dengan lampiran KD lembar 2 dan arsip Kantor Daerah

11 Membuat Rekapitulasi Pelunasan (RP), selanjutnya setiap hari jam kerja dicocokkan dengan Buku Gudang (BG) dibagian Gudang

#### 5. Bagian Gudang

12 Menerima Kitir SBK bagian 'Tengah' dari Kasir sebagai dasar untuk Mengambil Barang Jaminan (BJ) yang ditebus.

13 Mencocokkan nomor kitir 'Luar' yang diterima dari

- nasabah dan nomor kitir 'Tengah' yang diterima dari Kasir dengan nomor barang jaminan yang ditembus
- 14 Apabila telah sesuai, menyerahkannya BJ kepada nasabah
- 15 Atas dasar SBK kitir bagian 'Tengah' dicatat dalam Buku Gudang (BG)

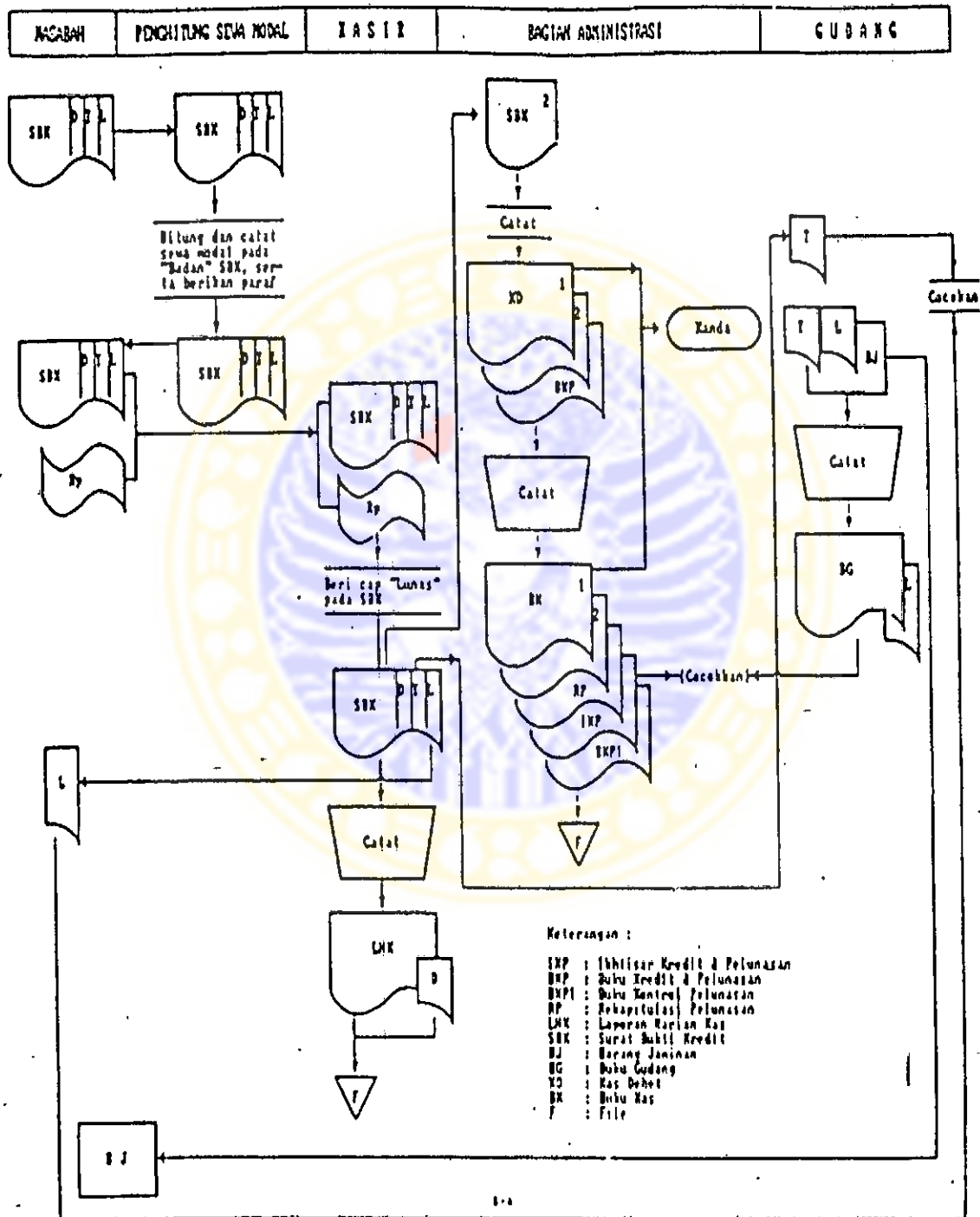
Formulir-formulir yang terkait :

1. Kas Debet
2. Surat Bukti Kredit
3. Buku Kredit dan Pelunasan
4. Rekapitulasi Pelunasan
5. Buku Kontrol Pelunasan
6. Ikhtisar Kredit dan Pelunasan
7. Buku Gudang

Prosedur Pelunasan dapat digambar sebagai berikut :

GAMBAR 4.

PROSEDUR PELUNASAN PINJAMAN YANG DIBERIKAN



Sumber : Kanda XI Perum Pegadaian

1.3.5. Prosedur Lelang

No. Pelaksanaan	Langkah	Aktivitas
1. Pelaksana Lelang	1	Menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan Dilelang (BAPL) dengan lampiran Daftar Rekapitulasi Barang Jaminan yang akan dilelang (DRBL), Formulir Penjualan Lelang (FPL) beserta Barang Jaminan (BJ) dari bagian administrasi
	2	Cocokkan dengan fisik barang jaminan yang akan dilelang, selanjutnya proses lelang.
	3	Menetapkan harga penjualan lelang dengan pedoman sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila Taksiran Baru lebih rendah dari Uang Pinjaman + Sewa Modal (penuh), maka harga minimal lelang sebesar Taksiran Baru + Uang Pinjaman + Sewa Modal (penuh) dari UP</li> <li>- Apabila Taksiran Baru lebih tinggi dari Uang Pinjaman + Sewa Modal (penuh), maka harga minimal lelang seharga Taksiran Baru + Sewa Modal (penuh) dari UP</li> </ul> Taksiran baru dibulatkan menjadi rupiah penuh (lihat contoh perhitungan)
	4	Setiap barang jaminan yang telah laku dilelang, kepada pembelinya dibebankan Biaya Lelang Pembeli sebesar 9 % dan dana sosial sebesar 7%.

- 5 Penjualan harga lelang didasarkan kepada penawaran tertinggi dan disetujui oleh Pelaksana Lelang dan langsung dicatat pada Daftar Rincian Hasil Lelang.
- 6 Selesai lelang buat Berita Acara Lelang (BAL) dan menyerahkan pada Kasir bersama uang pendataan lelang. Untuk barang-barang yang tidak laku dilelang catat pada Register Barang Sisa Lelang (RBSL), selanjutnya didistribusikan sebagai berikut :
- BAL, RBSL dan uang kepada kasir.
2. Kasir
- 7 Menerima BAL, RBSL dan uang hasil lelang dari Pelaksana lelang
- 8 Atas Dasar BAL dan uang tunai yang diterima catat pada Laporan Harian Kas (LHK) dan uang simpan dibrankas. Serahkan BAL dan RBSL kepada Bag Administrasi
3. Bagian Administrasi
- 9 Menerima BAL dan RBSL dari kasir
- 10 Mencatat nomor-nomor barang jaminan yang dilelang pada Buku kredit dan Pelunasan (BKP)
- 11 Berdasarkan bukti-bukti tersebut buat Kas Debet (KD) dan catat dalam Buku Kas (BK) dalam rangkap 2, selanjutnya didistribusikan sebagai berikut :
- BK dengan lampiran KD lembar 1 (asli) ke Kantor Daerah.
  - BK dengan lampiran KD,

lembar 2 BAL,RGBSI arsip  
Kantor Cabang

Formulir-formulir yang terkait :

1. Kas Debet
2. Buku Kas
3. Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan  
yang akan dilelang
4. Berita Acara Lelang
5. Buku Kredit dan Pelunasan
6. Register Barang Sisa Lelang

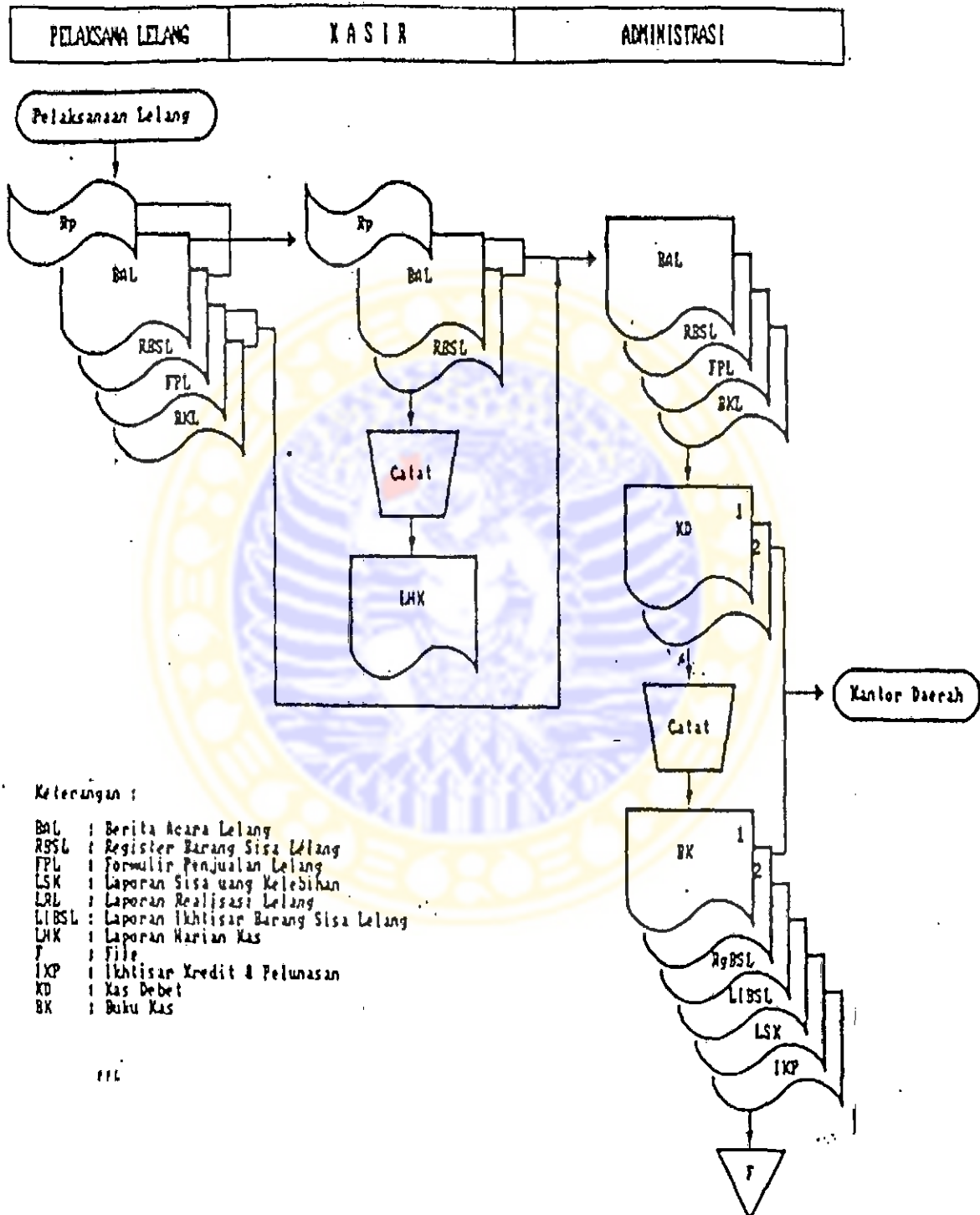
Prosedur Lelang dapat digambarkan sebagai berikut :





GAMBAR 5.

## PROSEDUR PELAKSANAAN LELENG



Sumber : Kanda XI Perum Pegadaian

#### 1.4. Barang Jaminan

Barang jaminan adalah barang-barang milik nasabah yang merupakan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian. Barang-barang jaminan tersebut dikelompokkan menurut jenis golongannya. Pengelompokan tersebut merupakan standart untuk barang yang ada disemua gudang kantor cabang Perum Pegadaian dan pemberian nomor Barang Jaminan disesuaikan dengan nomor Surat Bukti Kredit.

Adapun kegunaan dari barang jaminan adalah :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Perum Pegadaian untuk mendapatkan pelunasan dengan barang jaminan tersebut bilamana nasabah ingkar, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Memberi dorongan kepada nasabah untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaannya yang telah dijamin kepada Perum Pegadaian.

Sedang barang jaminan yang tidak boleh dijadikan jaminan sesuai dengan aturan dasar Perum Pegadaian antara lain :

1. Barang milik pemerintah.
2. Barang yang mudah rusak/busuk termasuk makanan/minuman dalam kaleng, dalam botol dan dalam peti.

3. Barang yang amat kotor.
4. Barang yang memerlukan surat ijin atau dilarang penjualannya kalau dilelang, seperti : senjata api, candu dan lainnya.
5. Barang yang menimbulkan kebakaran atau letupan.
6. Barang yang tidak tetap harganya atau sukar ditetapkan taksirannya, seperti : barang-barang purbakala, alat pemotret dan juga barang yang disewabelikan. Barang dagangan dalam jumlah besar, berlian atau permata yang terlepas dari emasnya.

#### 1.5. Laporan Keuangan Kantor Daerah Perum Pegadaian

Salah satu bentuk laporan keuangan Kantor Daerah Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

## PERUM PEGADAIAN

## NERACA

Per Desember 19xx

AKTIVA	xx	PASSIVA	xx
AKTIVA LANCAR	xx	KEWAJIBAN LANCAR	xx
Bank	xx	Utang Bea Lelang	xx
Investasi jangka pendek	xx	Utang kepada Nasabah	xx
Pinjaman yang diberikan	xx	Utang Pajak	xx
Piutang non usaha	xx	Utang kepada Pegawai	xx
Uang muka	xx	Biaya y.m.h. dibayar	xx
Pajak yang dibayar dimuka	xx	Pendapatan diterima dimuka	xx
Biaya yang dibayar dimuka	xx	Utang lancar lainnya	xx
Pendapatan y.m.h diterima	xx	Penyisihan Piutang	xx
	-----		-----
JUMLAH AKTIVA LANCAR	xx	JUMLAH	xx
REKENING ANTAR KANTOR		REKENING ANTAR KANTOR	
RAK antar Kantor Daerah	xx	RAK antar kanda	xx
RAK Kanda - Kantor Pusat	xx	RAK Kanda-Kantor Pusat	xx
RAK Kancab - Kanda	xx	RAK Kancab-Kanda	xx
	-----		-----
JUMLAH	xx	JUMLAH	xx
AKTIVA TETAP		MODAL	
Tanah	xx	Modal Awal	xx
Aktiva dalam penyelesaian	xx	Tambahan Modal	xx
Gedung	xx	Modal donasi	xx
Mobil	xx	Selisih revaluasi aktiva tetap	xx
Inventaris	xx	Cadangan Umum	xx
Instalasi	xx	R/L	xx
	-----		-----
JUMLAH	xx	JUMLAH	xx
AKTIVA LAIN-LAIN	xx		
Barang sisa lelang	xx		
Aktiva yang disisihkan	xx		
	-----		-----
JUMLAH	xx		
	-----		-----
JUMLAH AKTIVA	xx	JUMLAH KEWAJ + MODAL	xx
	-----		-----

Sumber : Kanda XI Perum Pegadaian

**PERUM PEGADAIAN**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
 Per Des 19xx

<b>PENDAPATAN USAHA</b>	
Pendapatan sewa modal	xx
Pendapatan Usaha lainnya	xx
Pendapatan Investasi	xx
	<hr/>
JUMLAH PENDAPATAN	xx
<b>BIAYA USAHA</b>	
Biaya bunga dan provisi	xx
Biaya pegawai	xx
Biaya administrasi	xx
Biaya umum	xx
Biaya pajak (PPN dan PBB)	xx
Biaya penyusutan dan amortisasi	xx
Biaya penyisihan piutang	xx
Biaya usaha lainnya	xx
	<hr/>
JUMLAH BIAYA	( xx )
<hr/>	
LABA USAHA	xx
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN	xx
RUGI LAIN-LAIN	xx
LABA (RUGI) LUAR BIASA	xx
	<hr/>
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	xx
PAJAK PENGHASILAN	xx
	<hr/>
LABA BERSIH SETELAH PAJAK PENGHASILAN	xx

Sumber : Kanda XI Perum Pegadaian

## 2. PEMBAHASAN

Berbicara soal Pegadaian, mungkin langsung terbayang dimata gedung-gedung yang tak terurus dan kotor. Didalamnya para pegawai yang loyo-loyo bekerja tanpa semangat. Sementara banyak orang malu datang ketempat ini, karena menggadaikan barang, atau harta lantas saja dipersepsikan sebagai "kepepet" agar bisa makan terus.

Cap kemiskinan ini berpuluh-puluh tahun melekat pada Pegadaian. Sampai-sampai pejabat pemerintahan didaerah lima-enam tahun lalupun masih merasa risih dengan kehadiran lembaga ini. Takut daerahnya dilabel miskin, atau menganggap daerahnya sudah lepas dari kemiskinan, sehingga tidak diperlukan lagi Pegadaian.

Kini warna suram itu perlahan mulai berubah. Tidak saja diperlihatkan dengan penampilan fisik yang lebih baik, gedung-gedung yang bersih terurus rapi, pegawai-pegawai yang lebih bersemangat karena gajinya sudah dinaikkan dua kali lipat, tapi juga bisa dilihat dari kiprah lembaga ini dalam perekonomian nasional.

Menghapus pandangan yang terlanjur salah dari masyarakat maupun para pejabat pemerintah sendiri tentang Pegadaian bukanlah semudah seperti membalikkan tapak tangan. Makanya, Perum Pegadaian sendiri tegas-tegas mengisyaratkannya sebagai sasaran utama yang hendak



dicapai. Pegadaian mau menunjukkan bahwa mereka tidak melulu identik cap kemiskinan, karena mereka sesungguhnya punya potensi besar untuk berperanan dalam sektor produktif dari masyarakat menengah kebawah yang selama ini tidak tersentuh oleh lembaga keuangan perbankan. Dan ini merupakan tugas yang berat bagi manajemen, karena harus memperbaiki posisi dan performance Pegadaian yang dipimpinnya.

Posisi dan performance Pegadaian dapat dilihat terutama pada laporan keuangannya. Karena dalam laporan keuangan tampak hasil-hasil yang telah dikerjakan oleh Pegadaian pada saat dan periode tertentu. Hasil-hasil yang tertera dalam laporan keuangan tergantung dari kebijakan akuntansi yang diambil oleh pihak manajemen Pegadaian. Kebijakan akuntansi tidak lain adalah proses pemilihan metode-metode alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan dari semua yang mungkin tersedia untuk laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diambil oleh Pegadaian dalam menyelesaikan masalah sewa modal yang masih harus diterima adalah mengeluarkan sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan dari rekening pendapatan yang masih harus diterima dalam neraca dan rekening pendapatan sewa modal dalam laporan laba rugi. Kemudian menempatkannya dalam rekening

administratif, yaitu suatu rekening yang tidak termasuk dalam neraca maupun laporan laba rugi. Alasan Pegadaian menggunakan kebijakan ini karena biasanya sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan mengandung ketidakpastian yang relatif tinggi, sehingga kemungkinan bisa terlunasi oleh nasabah sulit dipastikan. Pengakuan pendapatan dari sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan, baru diakui pada saat pelunasan oleh nasabah. Jadi bisa saja pendapatan itu diakui pada periode yang berbeda dengan saat awal terjadinya sewa modal yang masih harus diterima tersebut.

Penggunaan metode cash basis biasanya diterapkan untuk suatu perusahaan jasa, dimana penyelesaian jasa memakan waktu relatif pendek, sehingga penerimaan uang dari konsumen terjadi hampir bersamaan dengan saat penyerahan jasa. Ini berarti bahwa saat penjualan jasa atau saat penerimaan kas keduanya dapat dijadikan pengujian untuk dasar pengukuran dan pengakuan pendapatan. Metode cash basis juga bisa digunakan pada suatu transaksi jasa kredit dimana penerimaan kasnya masih berada dalam ketidakpastian yang relatif tinggi. Sehingga pengakuan pendapatan akan menyebabkan overstated pada laporan keuangan (laporan laba rugi) periode tersebut. Menurut Paton dan Littleton, pengakuan atas

dasar tunai hanya digunakan dengan alasan bahwa dalam beberapa hal penyerahan jasa adalah suatu peristiwa yang kurang mudah untuk dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan dibandingkan dengan penjualan barang, dan hal ini sebenarnya berlaku untuk jasa profesi yang mempunyai karakteristik :

- a. Spesifikasi tidak ditentukan secara jelas dan pasti pada permulaan pekerjaan.
- b. Jumlah pendapatan total yang harus ditagih tergantung pada hasil pekerjaan yang bersangkutan.

Bila sewa modal yang masih harus diterima dihubungkan dengan metode teori cash basis Paton dan Littleton tersebut, maka jelaslah bahwa sewa modal yang masih harus diterima tidak sesuai untuk metode akuntansi cash basis, karena spesifikasi sewa modal yang masih harus diterima adalah merupakan piutang jangka pendek dan jumlahnya sudah pasti dapat ditentukan tiap bulannya. Dalam hal ini Pegadaian memperhitungkan beban sewa modal yang harus ditanggung nasabah sebesar presentase tertentu dari jumlah kredit yang telah ditarik dan beban sewa modal tersebut diperhitungkan setiap 15 hari. Selain itu jumlah pendapatan total sewa modal yang harus diterima tidak tergantung dari hasil pekerjaan yang bersangkutan. Biaya penagihan dan pengumpulan sewa modal yang masih harus diterima tidak selalu tinggi, karena bisa diatasi



pendapatan yang akan digunakan Pegadaian untuk membiayai operasi, pertumbuhan dan sisa hasil usahanya.

Faktor likuidasi ini dapat mendukung kebijakan akuntansi Pegadaian dalam sewa modal yang masih harus diterima, dimana yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan dianggap tidak likuid, karena ketidakpastian penerimaan kasnya relatif tinggi baik jumlah maupun waktunya.

Berikut ini akan penulis analisis faktor likuiditas dalam hubungannya dengan sewa modal yang masih harus diterima tersebut. Telah disebutkan diatas bahwa nasabah atau penerima kredit akan dikenakan beban sejumlah presentase tertentu dari jumlah kredit yang ditarik. Beban sewa modal bagi nasabah sebaliknya merupakan pendapatan bagi Pegadaian sebagai pemberi kredit. Dengan kata lain, pendapatan sewa modal sangat erat kaitannya dengan kredit yang diberikan. Pendapatan sewa modal akan digunakan oleh Pegadaian untuk membayar kewajiban biaya bunga dan provisi, biaya pegawai, dan lain-lain. Dari pendapatan sewa modal ini sebenarnya Pegadaian menunjukkan keberhasilannya dalam berperan. Keberhasilan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga mereka tidak malu lagi untuk datang ke Pegadaian.



Kebijakan akuntansi Pegadaian untuk mencantumkan seluruh piutang kredit tanpa batas umur (yang telah dikurangi dengan cadangan tidak tertagihnya piutang pokok) yang diikuti dengan penyajian sewa modal yang masih harus diterima dengan batasan umur kurang dari 120 hari atau 4 bulan sebenarnya akan merugikan Pegadaian dalam performancenya. Sebenarnya penyajian sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan bukanlah memberi harapan kosong pada masyarakat bahwa penerimaan kas belum tentu tercapai, karena Pegadaian sudah mengadakan suatu rekening pencadangan atau kemungkinan tidak tertagihnya sewa modal yang masih harus diterima, yaitu "Penyisihan pendapatan yang masih harus diterima". Jadi sewa modal yang harus diterimapun sudah berada dalam bentuk yang mempunyai kepastian yang relatif tinggi, sehingga bisa dianggap sebagai pendapatan tahun berjalan. Dilain pihak penerapan prinsip matching, yaitu pendapatan harus dipertemukan dengan biaya yang menghasilkan pendapatan itu, menunjukkan bahwa pendapatan sewa modal harus dipertemukan dengan biaya bunga dan provisi yang menjadi sumber timbulnya pendapatan sewa modal, karena dari dana itulah Pegadaian dapat memberikan kredit. Bila pendapatan sewa modal baru diakui pada saat penerimaan kas yang mungkin baru diterima pada periode berikutnya, maka



pendapatan pada periode penerimaan kas akan menjadi overstated. Sedangkan pendapatan pada periode berjalan akan understated, karena adanya biaya bunga dan provisi yang tidak bertemu dengan pendapatan yang dihasilkannya.

Setiap jenis usaha akan selalu mengandung resiko. Besar kecilnya resiko tergantung dari luar, dalam diri ataupun dari keduanya. Demikian juga halnya dengan manusia yang akan selalu berhadapan dengan resiko kegagalan dalam berusaha. Tentu saja ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperkecil resiko itu. Tetapi karena keterbatasan dalam menghadapi perubahan keadaan, baik dari luar seperti perubahan ekonomi dunia, perubahan peraturan pemerintah, bencana alam, dan lain-lain atau dari dalam misalnya kemampuan atau skill, kepandaian, dan sebagainya, maka manusia bisa saja mengalami kegagalan dalam usahanya. Hal ini sangat disadari oleh pihak Pegadaian dalam usahanya memberi kredit kepada nasabah. Resikonya bagi Pegadaian adalah tidak dapat dikembalikannya piutang pokok maupun sewa modalnya. Penekanan resiko seminimal mungkin dilakukan dengan permintaan barang jaminan nasabah atas kredit yang diberikan kepadanya. Kegunaan jaminan kredit seperti yang telah penulis kemukakan dimuka diantaranya adalah memberikan hak dan kekuasaan pada Pegadaian untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan

tersebut bilamana nasabah melakukan ingkar, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Kebijakan akuntansi Pegadaian mengenai piutang macet, dimana nasabah sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk melunasi pinjamannya adalah :

1. Menutup pinjaman yang diberikan dengan membebankan ke rekening penyisihan piutang.
2. Mengakui penerimaan kas dari penjualan barang jaminan sebagai pendapatan lain-lain.

Dalam prakteknya, ternyata penjualan barang jaminan sering tidak semudah yang diperkirakan karena harus menunggu terkumpulnya barang jaminan yang akan dilelang dan kesulitan mencari pembeli barang jaminan tersebut. Tetapi kalau pembelinya sudah didapat maka dalam waktu beberapa hari hasil penjualan sudah dapat diterima secara kas oleh Pegadaian.

Dalam bab -II disebutkan SAK sebagai salah satu prinsip akuntansi yang lazim Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Bila ditinjau dari pengertian tersebut, maka kebijakan akuntansi Pegadaian mempunyai

kelemahan, yaitu dengan adanya pendapatan yang berasal dari penjualan barang jaminan yang baru diakui pada saat penerimaan kas. Artinya Pegadaian mengabaikan adanya suatu tambahan aktiva yang berupa barang jaminan yang berasal dari nasabah sebagai kompensasi atas macetnya kredit yang diberikan oleh Pegadaian pada saat kredit tersebut dinyatakan sebagai kredit macet. Sebab secara ekonomis Pegadaian langsung mendapatkan hak atas jaminan barang nasabah pada saat nasabah sudah dianggap tidak dapat melunasi hutang kreditnya. Tambahan aktiva ini didapatkan oleh Pegadaian dari jasa pemberian pinjaman atau kredit yang ternyata tidak bisa dilunasi oleh nasabah yang seharusnya diakui sebagai suatu pendapatan bagi Pegadaian. Bila selanjutnya barang jaminan ini dijual oleh Pegadaian dan mendapatkan penerimaan kas, maka sebenarnya hanyalah merupakan proses pendapatan. Sifat transaksi penjualan ini serupa dengan penjualan investasi perusahaan. Hanya bedanya kelebihan penjualan di atas sisa piutang kredit macet dikembalikan kepada nasabah, tidak diakui sebagai keuntungan. Dengan demikian penulis mengusulkan jurnal yang bisa dibuat atas perpindahan hak penguasaan barang jaminan nasabah adalah:

Barang jaminan nasabah	xx
Pendapatan dari barang jaminan	xx

Akun baru yang berupa "Pendapatan dari barang jaminan" mengandung arti informasi pendapatan tersebut tidak berupa piutang penerimaan kas. Mengenai besarnya jumlah pendapatan ini, sebaiknya dinilai sebesar jumlah pinjaman yang diberikan dan beban sewa modal yang harus dibayar oleh nasabah, karena besarnya hak Pegadaian memang hanya sejumlah itu. Kalau terjadi penerimaan kas atas penjualan barang jaminan yang jumlahnya melebihi hak Pegadaian, maka Pegadaian dapat membuat jurnal :

Kas	xx	
Barang jaminan nasabah		xx
Utang kepada nasabah		xx

dan jurnal ini dibuat bila penjualannya diurus sendiri oleh Pegadaian. Tetapi bila penjualannya diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara, maka jurnal yang dibuat adalah :

Kas	xx	
Barang jaminan nasabah		xx

Penulis menyetujui kebijakan akuntansi Pegadaian yang menutup piutang macet dan membebankan ke penyisihan piutang. Dengan alasan Pegadaian sebagai lembaga perkreditan yang mempunyai kegiatan utama memberikan kredit harus selalu menjaga tingkat likuiditasnya. Kerugian dari macetnya piutang harus selalu ditutup oleh suatu cadangan, tidak boleh ditutup dengan barang jaminan

nasabah karena barang tersebut masih memerlukan waktu untuk mengubah ke bentuk uang. Penutupan piutang macet dengan suatu cadangan akan dikompensasikan oleh penerimaan barang jaminan nasabah yang besarnya sama dengan piutang macet tersebut.

Tujuan utama laporan keuangan sebagai informasi bagi para pemakai mempunyai prinsip pengungkapan selengkapnyanya. Prinsip ini menghendaki laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menggambarkan dengan tepat kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu dan berisi informasi yang memadai, sehingga laporan keuangan bermanfaat bagi pemakainya.

Pengungkapan seluruh sewa modal yang masih harus diterima, termasuk didalamnya sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan, dan penerimaan barang jaminan nasabah yang jumlahnya material akan merupakan suatu informasi yang berguna, baik bagi pemakai intern maupun pemakai ekstern sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan ekonomi.



## BAB IV

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan.

1. Pegadaian yang didirikan sejak jaman VOC tahun 1746 merupakan salah satu lembaga perkreditan yang mempunyai fungsi utama menyalurkan uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Dengan demikian pendapatan sewa modal dari kredit yang diberikan kepada nasabah merupakan unsur pendapatan yang utama. Sehingga pengakuan atas pendapatan sewa modal tersebut akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pegadaian untuk mencatat pendapatan sewa modal tidak menggunakan metode accrual basis secara murni. Hal ini tampak pada pengakuan terhadap sewa modal yang masih harus diterima. Dimana sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan dimasukkan dalam rekening administratif "Sewa modal dalam penyelesaian", yaitu suatu rekening yang berada diluar Neraca dan laporan laba rugi.
3. Dalam menjalankan fungsinya menyalurkan uang pinjaman atau kredit, Pegadaian akan selalu meminta



## BAB IV

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan.

1. Pegadaian yang didirikan sejak jaman VOC tahun 1746 merupakan salah satu lembaga perkreditan yang mempunyai fungsi utama menyalurkan uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Dengan demikian pendapatan sewa modal dari kredit yang diberikan kepada nasabah merupakan unsur pendapatan yang utama. Sehingga pengakuan atas pendapatan sewa modal tersebut akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pegadaian untuk mencatat pendapatan sewa modal tidak menggunakan metode accrual basis secara murni. Hal ini tampak pada pengakuan terhadap sewa modal yang masih harus diterima. Dimana sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan dimasukkan dalam rekening administratif "Sewa modal dalam penyelesaian", yaitu suatu rekening yang berada diluar Neraca dan laporan laba rugi.
3. Dalam menjalankan fungsinya menyalurkan uang pinjaman atau kredit, Pegadaian akan selalu meminta

- jaminan kredit sebagai tindakan berjaga-jaga untuk menghindari kemungkinan tidak tertagihnya piutang pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Pegadaian akan selalu mendapatkan hak atas barang jaminan pada saat kredit dinyatakan macet oleh Pegadaian.
4. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan untuk mencatat piutang kredit yang macet dilakukan dengan jalan menutup piutang pokok maupun sewa modal, dan kemudian membebankan kedalam rekening "Penyisihan piutang" dan "Penyisihan pendapatan yang masih harus diterima", yaitu suatu rekening pencadangan atas kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang. Setelah itu menunggu adanya penerimaan kas dari hasil penjualan barang jaminan nasabah untuk mengakui pendapatan atas penjualan tersebut (metode cash basis).
  5. Dari hasil analisa terlihat bahwa kebijakan akuntansi kurang sesuai dengan prinsip matching. Ketidak sesuaian prinsip matching ini terjadi pada pendapatan yang understated pada satu periode dan overstated pada periode penerimaan kas karena tidak bertemunya pendapatan dengan biaya yang menghasilkan pendapatan itu. Hal ini akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak wajar.

## 2. Saran.

1. Perlunya diadakan perubahan kebijakan akuntansi dalam pengakuan pendapatan yang berhubungan dengan sewa modal yang masih harus diterima dan pengakuan pendapatan yang berasal dari penerimaan barang jaminan nasabah setelah kreditnya dinyatakan macet. Dengan demikian ketidakwajaran laporan keuangan yang dihasilkan dapat dihindari. Dan laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dipercaya (reliable) bagi pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomi telah teruji kebenarannya.
2. Perubahan kebijakan akuntansi dalam pengakuan pendapatan yang berhubungan dengan sewa modal yang masih harus diterima ; penulis sarankan diubah dari metode "accrual basis yang dimodifikasi", dimana sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau 4 bulan tidak diakui sebagai pendapatan tahun berjalan dan diakui pada saat penerimaan kas, menjadi "full accrual basis", dimana semua sewa modal yang masih harus diterima diakui sebagai pendapatan termasuk didalamnya sewa modal yang masih harus diterima yang berumur lebih dari 120 hari atau atas kemungkinan tidak tertagih piutang.

3. Metode cash basis untuk pengakuan pendapatan yang berasal dari penjualan barang jaminan nasabah sebagai pelunasan kredit yang tidak terbayar supaya diubah menjadi metode accrual basis. Sehingga pendapatan atas penerimaan barang jaminan sudah harus diakui pada saat permindahan hak kekuasaan atas barang jaminan dari nasabah ke Pegadaian, yaitu pada waktu kredit dinyatakan macet oleh Pegadaian. Penggunaan metode accrual basis akan dapat membantu Pegadaian untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih tepat atas setiap rupiah dari sumber dana yang diputarkan oleh Pegadaian kepada para pemilik dan kreditor. Karena metode accrual basis sesuai dengan prinsip matching yang mempertemukan setiap unsur pendapatan dengan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut.
4. Penulis mengharapkan penelitian ini tidak berhenti sampai disini saja. Penulis menyadari kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri penulis. Untuk memperoleh suatu pengembangan dan perbaikan, penulis mengharapkan kepada peneliti yang lain untuk melanjutkan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- AICPA, APB Statement No. 4: Basic concept And Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises, New York, 1970.
- ....., APB Statement No. 4: Konsep Dasar Dan Prinsip Akuntansi Yang Melandasi Laporan Keuangan Perusahaan Bisnis, Terjemahan, Penerbit AK Group, Yogyakarta, 1987.
- Belkaoui, Ahmed, Accounting Theory, Harcourt Brace Jovanovich Inc., New York, 1981.
- Hendriksen, Eldon S., Accounting Theory, Third Edition, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1977.
- ....., Teori Akuntansi, Edisi Keempat, Terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1990. \*
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1994.
- ....., Standar Akuntansi Keuangan, Buku Dua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1994.
- Mulyadi, Pemeriksaan Akuntan, Edisi Ketiga, Bagian - Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta, 1990.
- Munawir, Analisa Laporan Keuangan, -Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Paton, W.A., and Littleton, A.C., An Introduction to Corporate Accounting Standarts, American Accounting Association, 1990.
- ....., An Introduction to Corporate Accounting Standards Monograph No. 3, American Accounting Association, Evanston Illinois, 1990.
- Parwoto Wignjohartojo, Analisa Laporan Keuangan, Cetakan Pertama, Purna Cipta, Surabaya, 1981.
- S. Hadibroto, Studi Perbandingan Akuntansi Amerika, Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Di Indonesia, PT Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1983.

Theodurus M. Tuanakotta, Teori Akuntansi, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 1984.

Thacker, Ronald A.J., Accounting Principles, Second Edition, Prentice Hall Inc. Englewood cliffs, New York, 1987.

Zaki Baridwan, Intermediate Accounting, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta, 1989.





## LAMPIRAN 1

PERUM PEGADAIAN  
NERACA  
Per 30 Nopember 1994

<u>AKTIVA</u>		<u>KEWAJIBAN DAN MODAL</u>	
<u>AKTIVA LANCAR</u>		<u>KEWAJIBAN LANCAR</u>	
Kas	240.779.700	Utang suran wajib	22.394.132
Bank	107.384.965	Utang bea Lelang	2.675.845
Investasi jangka pendek	0	Utang kepada nasabah	23.392.786
Pinjaman yang diberikan	10.744.154.850	Utang Pajak	14.129.550
Piutang non usaha	35.579.310	Utang kepada Pegawai	31.500
Uang muka	66.977.100	Biaya y.m.h. dibayar	0
Pajak yang dibayar dimuka	0	Pendapatan diterima dimuka	0
Biaya yang dibayar dimuka	0	Utang lancar lainnya	40.333.565
Pendapatan y.m.h diterima	0		
Jumlah Aktiva Lancar	11.194.333.925	Jumlah Kewajiban Lancar	102.956.378
<u>RAK</u>		<u>RAK</u>	
RAK - Antar Kanda	0	RAK - Antar Kanda	3.712.500
RAK - Kanda - KP	102.811.630	RAK - Kanda - KP	994.196.000
RAK - Kancab - KP	3.935.317.857	RAK - Kancab - KP	23.304.783.759
Jumlah RAK	4.037.929.487	Jumlah RAK	24.302.692.259
<u>AKTIVA TETAP</u>		<u>MODAL</u>	
Tanah Gol II	6.700.501.337	Modal Awal	0
Aktiva dalam penyelesaian	0	Tambahan Modal PMP	0
Gedung	3.932.539.108	Modal donasi	0
Mobil	117.172.673	Selisih revaluasi aktiva tetap	0
Inventaris	458.931.478	Cadangan Umum	0
Instalasi	16.865.163	Laba ditahan	2.005.415.818
		Laba bulan berjalan	95.353.006
Jumlah Aktiva Tetap	11.225.807.759	Jumlah	2.100.768.824
<u>AKTIVA LAIN-LAIN</u>			
Barang sisa lelang	46.801.120		
Aktiva yang disisihkan	991.200		
Jumlah Aktiva Lain-lain	47.792.320		
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>26.506.415.491</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL</b>	<b>26.506.415.491</b>

Sumber : Kanda XI Perum Pegadaian

## LAMPIRAN 2

PERUM PEGADAIAN  
LAPORAN LABA RUGI  
PER 30 NOPEMBER 1994

KANTOR / KODE DAERAH : 11

1. PENDAPATAN USAHA	
- Pendapatan sewa modal	334.297.285
- Pendapatan Usaha lainnya	22.952.600
- Pendapatan Investasi	0
	<hr/>
- Jumlah Pendapatan Operasi	357.249.885
2. BIAYA USAHA	
- Biaya bunga dan provisi	27.130
- Biaya pegawai	193.956.928
- Biaya administrasi	10.709.690
- Biaya umum	43.581.460
- Biaya pajak (PPH dan PBB)	9.870.659
- Biaya penyusutan dan amortisasi	0
- Biaya penyisihan piutang	0
- Biaya usaha lainnya	2.720.264
	<hr/>
JUMLAH BIAYA USAHA	260.866.131
3. LABA USAHA	96.383.754
4. PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN	969.252
5. RUGI LAIN-LAIN	0
6. LABA (RUGI) LUAR BIASA	(2.000.000)
7. LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	95.353.006
8. PAJAK PENGHASILAN	0
	<hr/>
9. LABA BERSIH SETELAH PAJAK PENGHASILAN	95.353.006

Sumber : Kanda XI Perum Pegadaian

**LAMPIRAN 3**  
**PERUM PEGADAIAN**  
**NERACA**  
**Per 30 Nopember 1994**

<u>AKTIVA</u>		<u>KEMAJIBAN DAN MODAL</u>	
<u>AKTIVA LANCAR</u>		<u>KEMAJIBAN LANCAR</u>	
Kas	240.775.700	Utang iuran wajib	22.394.132
Bank	107.384.965	Utang bea Lelang	2.675.845
Investasi jangka pendek	0	Utang kepada nasabah	23.392.786
Pinjaman yang diberikan	11.867.604.485	Utang Pajak	14.128.550
Piutang non usaha	35.579.310	Utang kepada Pegawai	31.500
Uang muka	66.979.100	Biaya y.m.h. dibayar	0
Pajak yang dibayar dimuka	0	Pendapatan diterima dimuka	0
Biaya yang dibayar dimuka	0	Utang lancar lainnya	40.333.565
Pendapatan y.m.h diterima	34.905.285		
	<hr/>		<hr/>
Jumlah Aktiva Lancar	12.353.229.345	Jumlah Kewajiban Lancar	102.956.378
<u>RAK</u>		<u>RAK</u>	
RAK - Antar Kanda	0	RAK - Antar Kanda	3.712.500
RAK - Kanda - KP	102.611.630	RAK - Kanda - KP	994.196.000
RAK - Kancab - KP	3.935.317.857	RAK - Kancab - KP	24.970.903.840
	<hr/>		<hr/>
Jumlah RAK	4.037.929.487	Jumlah RAK	25.968.812.340
<u>AKTIVA TETAP</u>		<u>MODAL</u>	
Tanah Gol II	6.700.501.337	Modal Awal	0
Aktiva dalam penyelesaian	0	Tambahan Modal PMP	0
Gedung	3.932.539.108	Modal donasi	0
Mobil	117.172.673	Selisih revaluasi aktiva tetap	0
Inventaris	458.931.478	Cadangan Umum	0
Instalasi	16.665.163	Laba ditahan	2.005.413.818
	<hr/>	Laba (rugi) bulan berjalan	147.119.356
Jumlah Aktiva Tetap	11.225.809.759		<hr/>
		Jumlah	2.152.533.174
<u>AKTIVA LAIN-LAIN</u>			
Barang jaminan	559.540.981		
Aktiva sisa lelang	46.801.120		
Aktiva yang disisihkan	991.200		
	<hr/>		
Jumlah Aktiva Lain-lain	607.333.301		
	<hr/>		
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>28.224.301.892</b>	<b>JUMLAH KEMAJIBAN DAN MODAL</b>	<b>28.224.301.892</b>

Sumber : Hasil Olahan Penulis

## LAMPIRAN 4

PERUM PEGADAIAN  
LAPORAN LABA RUGI  
PER 30 NOPEMBER 1994

KANTOR / KODE DAERAH : 11

<b>PENDAPATAN USAHA</b>	
Pendapatan sewa modal	369.202.570
Pendapatan barang jaminan	16.861.065
Pendapatan Usaha lainnya	22.952.600
Pendapatan Investasi	0
<b>Jumlah Pendapatan Operasi</b>	<b>409.016.235</b>
<b>BIAYA USAHA</b>	
Biaya bunga dan provisi	27.130
Biaya gaji	193.956.928
Biaya administrasi	10.709.690
Biaya umum	43.581.460
Biaya pajak (PPH dan PBB)	9.870.659
Biaya penyusutan dan amortisasi	0
Biaya penyisihan piutang	0
Biaya usaha lainnya	2.720.265
<b>JUMLAH BIAYA USAHA</b>	<b>260.866.131</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>148.150.104</b>
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN,	969.252
RUGI LAIN-LAIN	0
LABA (RUGI) LUAR BIASA	(2.000.000)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	147.119.356
PAJAK PENGHASILAN	0
<b>LABA BERSIH SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>147.119.356</b>

Sumber : Hasil Olahan Penulis

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA